

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Fakta nyata laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumberdaya, terutama sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumberdaya ikan laut Indonesia yang tersebar di sembilan wilayah perairan utama Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton pertahun.

Potensi sumberdaya ikan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri atas pelagis besar (seperti tuna) 1,16 juta ton, pelagis kecil (seperti kembung) 3,6 juta ton, demersal (ikan yang hidup didasar perairan) 1,36 juta ton, udang penaid 0,094 juta ton, lobster 0,004 juta ton, cumi – cumi 0,028 juta ton dan ikan karang konsumsi 0,14 juta ton. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) sekitar 5,01 juta ton pertahun atau 80 % dari potensi lestari. Potensi budidaya laut seluas 2 juta ha (20% dari total potensi lahan perairan laut berjarak 5 km dari garis pantai) dengan volume 46,73 juta ton pertahun terdiri atas budidaya ikan (kakap, kerapu, dan gobia) udang, budidaya Molusca (kerang – kerangan, mutiara, teripang), dan budidaya rumput laut. Sampai saat ini potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 0,7 juta ton pertahun.

Potensi perikanan darat lainnya yang masih besar adalah budidaya payau (tambak) mencapai sekitar 913.000 ha, pada tahun 1999 potensi lahan budidaya baru dimanfaatkan sekitar 393.196 ha. Diharapkan pengembangan perikanan budidaya ini dapat mendatangkan devisa yang cukup besar. Jika potensi ini digarap secara optimal dengan mengusahakan sekitar 500.000 ha saja, dengan target produksi konservatif

sekitar 2 ton udang windu (*tiger prawn*) perhektar, setiap tahunnya setidaknya bisa dihasilkan 1 juta ton. Harga udang perkilogram adalah US\$ 10 maka nilai yang diperoleh mencapai US\$ 10 miliar. Secara keseluruhan nilai ekonomi potensi perikanan laut dan darat termasuk budidaya diperkirakan mencapai sekitar US\$ 78,1 miliar (Dahuri R., 2002).

Kekayaan sumberdaya yang melimpah belum menjamin kemakmuran bagi suatu bangsa oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan yang tepat, adanya otonomi daerah setelah pemberlakuan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pokok – pokok pemerintahan di daerah sedikit banyak menjawab perlunya pengelolaan sumberdaya perikanan yang tepat. Disebutkan dalam pasal 10, bahwa daerah propinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara kabupaten dan kota berwenang mengelola wilayah laut sejauh sepertiga dari batas kewenangan daerah propinsi atau sejauh 4 mil laut. Jenis kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan – kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. Kewenangan tersebut berwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administrasi, pengaturan tata ruang, serta penegakan hukum (Cholik F., 2002).

Dengan demikian, jelas bahwa implementasi otonomi daerah membawa implikasi terhadap aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan. Menurut Dahuri R., (2002) dampak otonomi daerah terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan : pertama, sudah seharusnya daerah mengetahui potensi perikanan serta batas – batas wilayahnya sebagai dasar untuk meregulasi pengelolaan sumberdaya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan sesuai daerahnya. Kedua, daerah diuntut bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perikanan kelautan di daerahnya itu. Ketiga, semakin terbuka peluang bagi masarakat lokal untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut perlu juga di tinjau adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan pusat adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagaian keuangan antara pemerintah daerah dengan pusat serta pemerataan antar daerah yang demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan atau pengawasan keuangannya.

Adanya peraturan perundang – undangan maka dengan sendirinya pengelolaan sumberdaya dapat berjalan dengan baik. Menurut Hartoto (1999) dalam Deasi (2005) menyatakan bahwa peraturan perundang – undangan tersebut memberikan kesempatan yang relatif lebih luas pada pemerintah tingkat lokal (kabupaten dan kota) agar mampu melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan dalam lingkup wilayah masing – masing. Dengan demikian pemerintah daerah akan mempunyai peluang untuk mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumberdaya alam tersebut dan dapat memfaatkannya guna pembangunan ekonomi wilayahnya.

Dilihat dari sudut sumberdaya perikanan, Kabupaten Lamongan mempunyai potensi yang cukup besar selain wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di Kabupaten Lamongan juga sangat cocok untuk di kembangkan budidaya air payau (tambak). Potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar tersebut memberikan keuntungan yang cukup besar pula, dimana dengan adanya kebijakan otonomi daerah Kabupaten Lamongan sepenuhnya dapat mengelola sumberdaya perikanan yang ada secara bertanggung jawab. Pengelolaan sumberdaya perikanan diharapkan dapat

mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang selama ini dirasakan belum optimal dan nantinya juga diharapkan dapat menjadi tumpuan perekonomian di Kabupaten Lamongan yang dapat digunakan sebagai sumber biaya operasional pembangunan daerah setempat.

Untuk mengetahui potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui besar kontribusi sumberdaya perikanan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan maka penelitian dengan judul “potensi usaha perikanan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan” ini perlu dilaksanakan. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif didalam penentuan peraturan tentang pengelolaan sumberdaya perikanan pada masa yang akan datang.

I.2 Perumusan masalah

Undang – undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang - Undang No 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang di *amandemen* menjadi Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan diberlakukanya undang – undang tersebut memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada. Adanya otonomi daerah, menuntut daerah mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki sebagai modal

untuk pembangunan daerah tersebut, salah satunya adalah pemanfaatan secara optimal sumberdaya perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Lamongan memiliki sumberdaya perikanan melimpah baik di laut maupun di daratan, yang merupakan aset kekayaan bagi daerah tersebut. Kondisi yang demikian menjadi salah satu faktor yang mendukung yang menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang strategis untuk dilaksanakannya pembangunan perikanan.

Sektor perikanan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis kelompok usaha antara lain kelompok usaha penangkapan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran. Dari kelompok usaha tersebut dapat dibedakan lagi menjadi beberapa pola usaha misalnya pola usaha penangkapan ikan di laut, budidaya tambak, budidaya sawah tambak, dan lain sebagainya. Besar kecilnya nilai kontribusi yang akan di berikan oleh tiap – tiap pola usaha perikanan tersebut akan berpengaruh terhadap nilai kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan.

Dari uraian diatas, maka pokok – pokok permasalahan yang perlu dikaji didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar potensi dan jumlah produksi usaha perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana pembangunan perikanan yang telah dilakukan di Kabupaten Lamongan?
3. Seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan ?
4. Bagaimana tingkat hubungan antara kontribusi sektor perikanan terhadap PAD ?
5. Apakah sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan sektor basis dalam kegiatan ekonomi perikanan di Propinsi Jawa Timur ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Potensi dan jumlah produksi usaha perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan.
2. Pembangunan sektor perikanan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Tingkat hubungan antara kontribusi sektor perikanan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Basis sektor perikanan di Propinsi Jawa Timur.

I.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lamongan : sebagai bahan informasi dan pertimbangan didalam pengambilan keputusan yang tepat dan penentuan kebijakan bagi pembangunan perikanan.
2. Perguruan Tinggi : sebagai bahan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan dan sebagai bahan informasi bagi penelitian – penelitian selanjutnya dalam rangka turut memajukan pembangunan di sektor perikanan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam adalah segala sumberdaya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Dengan perkataan lain sumberdaya alam adalah faktor produksi dan alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi (Fauzi, 2004).

Sumberdaya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya. Dengan kata lain sumberdaya adalah berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam suatu proses produksi atau aktifitas ekonomi seperti modal, tenaga manusia, energi, air, mineral, dan lain – lain. Dengan demikian sumberdaya mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu, dan tempat (Reksohadiprojo, 1985).

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu : 1) berbagai sumberdaya alam seperti air, ikan, minyak bumi dan lain – lain; 2) tata lingkungan fisik seperti pantai berpasir, tanah yang subur dan sebagainya. Dengan didasarkan pada pengertian sumberdaya (resources) adalah berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam satu proses produksi atau aktiva ekonomi seperti modal, tenaga manusia, energi, air mineral, dan lain – lain. Ditambahkan lagi bahwa beberapa sifat khusus dari sumberdaya alam yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa penyebaran sumberdaya alam tidak merata dan sifat saling ketergantungan antar sumberdaya alam (Katili, 1983).

2.2 Sumberdaya Perikanan

Dalam undang – undang No. 31 Tahun 2004 yang dimaksud perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya ikan, sumberdaya lingkungan serta segala sumberdaya ikan. Oleh karena itu adanya pengelolaan atau manajemen sumberdaya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan lingkungannya serta pengelolaan kegiatan manusia Victor (2002).

2.3 Usaha Perikanan

Usaha perikanan adalah suatu usaha terpadu mulai dari produksi hingga pemasaran yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab didasari azas kelestarian dengan memanfaatkan kemajuan iptek (Nurhakim, 2002).

Usaha perikanan yang ada sangat beragam, mulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam – macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan di perairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan yaitu dilaut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya) dengan mempergunakan alat tangkap ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan pembenihan atau membiakan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya (Tribawono, 2002).

2.4 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah suatu tindakan melalui pembuatan peraturan yang didasari oleh hasil kajian ilmiah yang kemudian dan pelaksanaannya diikuti oleh kegiatan Monitoring, Controlling dan Surveillance, dimana tujuan akhirnya adalah suatu kelestaraan sumberdaya perikanan dan lingkungannya dan memberikan keuntungan secara ekonomi maupun biologi, arti pengelolaan mencakup pengembangan dan pengendalian, dimana acuan yang dianut dalam pelaksanaannya adalah konsep perikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries) (Nurhakim, 2002). Menurut Widodo (2002), pengelolaan perikanan yaitu rangkaian kegiatan yang menjamin produksi yang berkelanjutan melalui : pengendalian upaya penangkapan, pengendalian upaya penangkapan, pengendalian hasil tangkapan (jumlah, ukuran, individu), pengayaan (enhancement) stok, rehabilitas habitat.

Dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dibidang perikanan yang dilakukan pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan ikan, mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal.

Pengelolaan sumberdaya perikanan (sumberdaya laut dan pesisir) merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena sumberdaya perikanan sangat rentan dan sensitive terhadap banyak perubahan. Khusus untuk sumberdaya ikan, kerentanan dan sensitifitasnya semakin tinggi karena merupakan sumberdaya hayati yang banyak dipengaruhi oleh perubahan – perubahan eksternal dan internal, yaitu perubahan yang terjadi disekitar atau tempat yang jauh dari ekosistem atau perubahan yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan ekosistem, serta perubahan lingkungan biotik maupun abiotik. Selain itu faktor manusia merupakan variabel penting yang menentukan status pemanfaatan dan potensi sumberdaya perikanan (Victor, 2002)

2.5 Pembangunan Sektor Perikanan

Menurut Banoewidjojo (1987) dalam Deisi (2005) pembangunan perikanan adalah semua usaha dibidang perikanan yang senantiasa menciptakan perubahan – perubahan struktur sosial, khususnya yang menyangkut masyarakat nelayan dan petani ikan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berasal dari bidang perikanan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada Garis – Garis Besar Haluan Negara tahun 1999. Undang – undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Strategis (RENSTRA) DKP 2002 – 2004 menekankan pertumbuhan ekonomi pada bidang kelautan dan perikanan dengan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan dengan sekaligus memelihara daya dukungnya.

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah “Ekosistem laut dan perairan tawar beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dipelihara kelestariannya, dan

didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia” (Dahuri 2002). Ada tiga hal pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan perikanan di Indonesia, yaitu : 1) mempertahankan sustainabilitas, 2) meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan (termasuk industri yang menangani komoditas ikan), 3) menghasilkan pemasukan Negara (Heruwati, 2002).

Sebagaimana tujuan pembangunan nasional dalam Tribawono (2002) dijelaskan bahwa yang diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia maka sumberdaya ikan merupakan suatu modal dasar pelaksanaan pembangunan nasional. Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya ikan maka pengaturan perikanan harus memberikan ladaan yang kuat untuk :

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masarakat nelayan dan petani ikan.
2. Mencukupi kebutuhan protein hewani (khusus ikan) dan sekaligus dapat memberikan motivasi dan semangat kepada nelayan dan petani ikan dalam peningkatan produksinya.
3. Mendorong peningkatan ekspor nonmigas yang berasal dari perikanan kemancanegara
4. Memberikan kesempatan kerja lebih luas untuk menampung kerja produktif

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan daratan (continental oriented) dibandingkan pembangunan yang berorientasi lautan (ocean oriented) berakibat pada kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor perikanan. Akibatnya secara kelembagaan perikanan berada pada level subsektor, sehingga kebijakan pembangunan perikanan selalu terpinggirkan dibandingkan sektor lainya karna secara kelembagaan perikanan tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat (Bakar, 2002).

2.6 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Selain itu dikatakan pula bahwa otonomi daerah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anonymous, 2004).

Menurut Mardiasmo (2002), otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Secara teoritis, otonomi daerah ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil – hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing – masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produksi melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu : meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,

menciptakan efisiensi dan eektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dan lain – lain PAD yang sah. Lain – lain PAD yang sah diatas, meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

2.7.2 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati – hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu

(satu tahun). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran pemerintah, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa – masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran – ukuran standart untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya di fokuskan pada upaya mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah.

Menurut UU No. 22 tahun 1999 pasal 79 tentang pembiayaan, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Untuk mengetahui besarnya kontribusi sumberdaya perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan, maka digunakan analisis sebagai berikut ;

2.8 Model Regresi Linear Sederhana

Menurut Assauri (1984), regresi sederhana adalah suatu pola hubungan yang merupakan fungsi, dimana hanya terdapat satu variabel yang menentukan atau variabel bebas (independent variable).

Regresi sederhana pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2004). Ditambahkan lagi oleh Daniel (2002) bahwa, analisa regresi linear sederhana digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada model ini, satu variabel bebas akan mempengaruhi variabel tak bebas, model matematis dari linear sederhana :

$$Y_i = a + b_{xi} + e$$

$$a = Y - bx$$

$$b = \frac{(\sum x_i y_i)}{(\sum x_i^2)}$$

$$t_r = \frac{r(\sqrt{n-2})}{(\sqrt{1-r^2})}$$

$$r^2 = \frac{b(\sum xy)}{(\sum Y^2)}$$

r^2 = keefisien determinasi yaitu presentase pengaruh x terhadap y nilainya berkisar antara (0 – 1). Nilai koefisien determinasi bisa juga diperoleh dengan menggunakan uji t.

2.9 Model Korelasi

Korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif (Primyastanto, 2006). Soekartawi (1994), menyatakan bahwa korelasi adalah alat statistik yang tugasnya mengukur sampai seberapa besar keeratan antara dua variabel. Besarnya kecilnya atau kuat-tidaknya

hubungan dua variabel tersebut dinyatakan dengan koefisien korelasi (r), sedang koefisien korelasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan kuat-tidaknya hubungan dua variabel.

Menurut Daniel (2002), uji korelasi digunakan hubungan hubungan antara dua variabel. Hubungan yang dimaksud bukanlah hubungan sebab akibat yang berlaku ada metode regresi. Model korelasi hanya bisa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linear). Untuk menguji hubungan yang tidak linear uji korelasi tidak bisa digunakan. Korelasi terbagi menjadi dua yaitu sederhana dan majemuk. Sederhana untuk hubungan dua variabel, majemuk untuk hubungan tiga variabel atau lebih. Korelasi majemuk tidak terlepas dari uji regresi. Korelasi dapat positif dan dapat negative, nilainya (ditunjukkan oleh besaran koefisien korelasi) berkisar antara 0 – 1. rumus untuk uji korelasi adalah :

$$R_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{(\sum x_i^2)(\sum y_i^2)}}$$

keterangan :

$$x_i = (X - \bar{X})$$

$$y_i = (Y - \bar{Y})$$

uji signifikansi koefisien regresi gunakan rumus :

$$t_r = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}}$$

dengan derajat bebas ($n - 2$)

bila $t_i > t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)}$ maka hipotesis ditolak dan apabila sebaliknya maka hipotesis diterima.

α = tingkat kepercayaan (*Level Of Significant*)

2.10 LQ (Location Quotient)

Glasson (1978) dalam Melathi (2006) menyarankan menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk menentukan basis atau bukan basis suatu sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Selain itu dinyatakan juga oleh Ambardi dan Pribawantoro (2002) dalam Melathi bahwa LQ merupakan sebuah indeks untuk mengukur tingkat *spesialisasi relative* suatu daerah didalam aktivitas sektor perekonomian tertentu. Disamping itu LQ merupakan tingkat spesialisasi yang membandingkan suatu daerah dengan wilayah yang lebih luas dimana daerah yang diamati merupakan bagian dari wilayah tersebut. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

Dimana :

LQ = Location Quotien

v_i = pendapatan sektor tertentu di daerah yang lebih kecil

v_t = pendapatan seluruh sektor di daerah yang lebih kecil

V_i = pendapatan sektor tertentu di daerah yang lebih luas

V_t = pendapatan seluruh sektor di daerah yang lebih luas

kriteria penilaian :

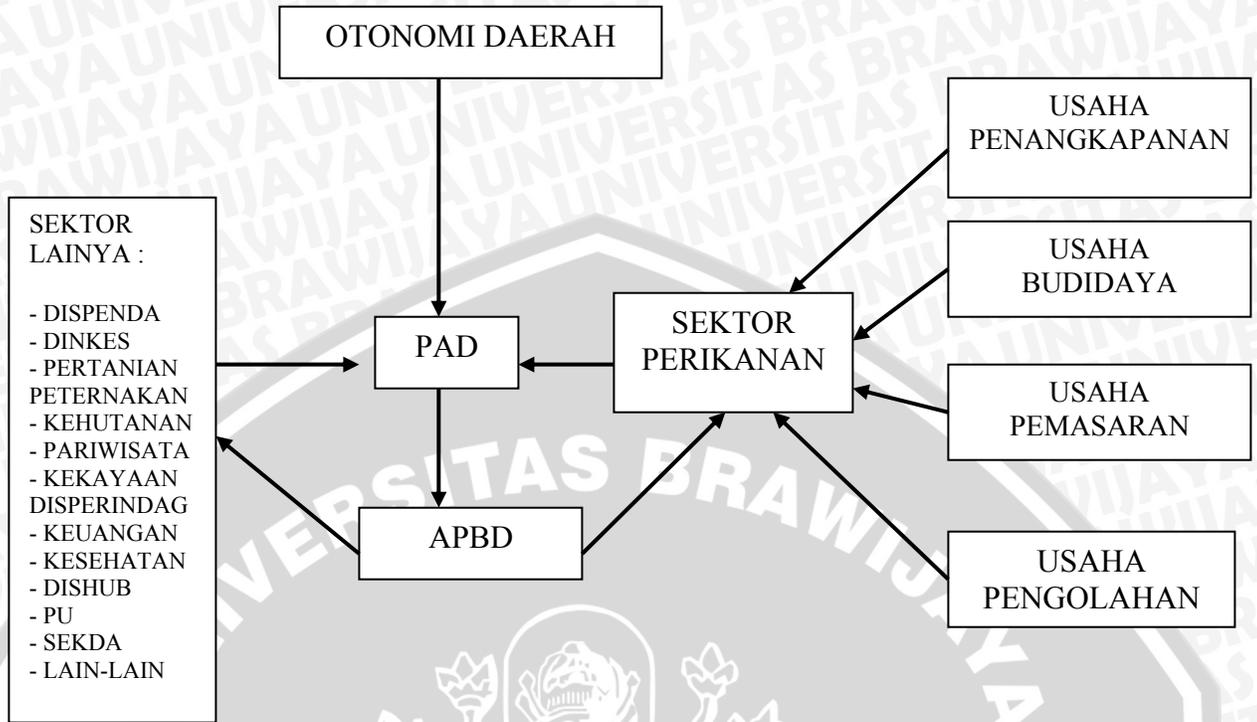
$LQ \geq 1$ = sektor merupakan kegiatan basis ekonomi

$LQ \leq 1$ = sektor bukan merupakan kegiatan basis ekonomi

2.12 Kerangka Berpikir

Diberlakukanya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menuntut kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengatur pembiayaan Pemerintah Daerah, salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan kontribusi sektor – sektor penyumbang PAD, sektor perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang PAD di Kabupaten Lamongan, sektor perikanan memiliki beberapa jenis usaha diantaranya adalah usaha perikanan tangkap, usaha budidaya, usaha pengolahan. Selain dengan cara penarikan retribusi yang efektif upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi masing – masing jenis usaha perikanan, karena semakin tinggi produksi usaha perikanan maka akan semakin tinggi kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap PAD. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin tinggi APBD suatu daerah yang dapat di alokasi untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah.

Salah satu tujuan pembangunan perikanan di Kabupaten Lamongan adalah peningkatan produksi usaha perikanan, agar pembangunan tersebut dapat terealisasi, maka dukungan dana dari APBD Kabupaten Lamongan sangat diharapkan. Besar kecilnya alokasi dana APBD terhadap suatu sektor tergantung dari seberapa penting peran sektor tersebut terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.12 Hipotesis

Menurut Koentjaraningrat (1991), suatu hipotesa adalah merupakan rumusan yang menyatakan harapan adanya hubungan tertentu antara dua fakta atau lebih.

Berdasarkan kerangka berpikir dan kajian teori yang ada, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga nilai kontribusi sektor perikanan berpengaruh secara signifikan/nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.
2. Diduga bahwa sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan sektor basis kegiatan ekonomi.

III METODE PENELITIAN

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka yang menjadi obyek penelitian adalah potensi sektor perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan beserta nilai kontribusi yang diberikan oleh masing – masing sektor yang ikut menyumbang dalam PAD Kabupaten Lamongan tahun 2002 – 2006.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pada tanggal 1 April 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2007. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang besar yaitu sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan panjang pantai 41.162 km. Kabupaten Lamongan memiliki 5 buah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yaitu Weru, Kranji, Brondong, Labuhan, Lohgung dengan produksi rata – rata 100 ton/hari dan sebagian wilayahnya sangat cocok digunakan usaha budidaya ikan air payau, dengan luas tambak 240 Ha Kabupaten Lamongan dapat menghasilkan \pm 79.600 ton/tahun yang sebagian besar berupa ikan Bandeng dan udang Windu sedangkan disektor budidaya air tawar juga sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan lahan seluas 601,20 Ha dapat berproduksi 832,8 ton/tahun, pada usaha budidaya mina padi Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil terbesar di Jawa Timur sedangkan pada usaha pengolahan ikan, terdapat berbagai jenis pengolahan diantaranya usaha pemindangan, pengeringan, terasi, pengesan, petis, kerupuk, ikan asin, tepung ikan dengan produksi 18.402,69 ton/tahun merupakan produksi tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2000,

dengan potensi perikanan yang cukup besar diduga daerah ini memiliki kontribusi cukup besar dari sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.2 Metode Penelitian

Penentuan metode ilmiah diperlukan untuk membatasi teknik dan prosedur penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian penjelasan (Explanatory atau Confirmatory Research) dengan menggunakan metode survei.

Penelitian penjelasan (Explanatory atau Confirmatory Research) merupakan suatu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel – variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya oleh karenanya penelitian ini dinamakan juga penelitian pengujian hipotesa atau *Testing Research*. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi penelitian ini fokusnya terletak pada penjelasan hubungan – hubungan antar variabel. Pendeskripsian bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, misalnya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain – lain (Singarimbun, 1982).

Metode survei adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu atau suatu studi ekstensif yang dipolakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tujuan survei adalah mendapatkan gambaran – gambaran yang mewakili daerah itu dengan benar dan ditujukan kearah pengumpulan fakta – fakta belaka. Pionir – pionir survey itu menunjukkan pandangannya kearah masalah sosial yang mendesak dan berusaha untuk mempengaruhi politik pemerintah yang sedang dijalankan.

3.3 Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Pada penelitian menggunakan data – data sekunder, berupa dokumen dari dinas – dinas terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Data sekunder adalah data yang sudah ada atau data yang diperoleh tidak dari sumbernya secara langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah (Marzuki, 1986).

Menurut Daniel (2002), menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Data sekunder data pula berupa tulisan – tulisan yang telah terbitkan, dan lain – lain. Buku – buku juga dapat digolongkan sebagai data sekunder. Ditambahkan lagi bahwa penggunaan data sekunder lebih banyak ditunjukkan untuk analisis kebijakan, analisis pertumbuhan yang kaitanya dengan perencanaan kedepan serta analisis kebijakan, analisis pertumbuhan yang kaitanya dengan perencanaan ke depan serta analisis tentang masalah – masalah yang ada dalam pembangunan.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, jenis – jenis dokumen yang digunakan pada penelitian ini meliputi dokumen – dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan. Dokumen – Dokumen tersebut berupa laporan – laporan penelitian tentang sektor perikanan, jurnal penelitian tentang kependudukan di Kabupaten Lamongan, dokumen tentang potensi usaha perikanan setempat, dokumen tentang realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, dokumen tentang realisasi pembangunan perikanan yang telah

dilakukan serta dokumen – dokumen lainnya yang bersifat intern pada instansi pemerintahan tersebut.

3.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi analisa secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kualitatif dilakukan untuk menjelaskan potensi riil usaha perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan. Sedangkan analisa deskriptif kuantitatif dilakukan untuk : mengetahui dan menganalisa besarnya kontribusi sumberdaya perikanan terhadap PAD, mengetahui signifikansi hubungan antara nilai kontribusi sektor perikanan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengetahui basis atau tidaknya sektor perikanan terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Lamongan.

3.5 Perumusan Model

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian untuk diambil suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis statistik, yaitu analisa korelasi dan regresi dimana yang dipakai adalah regresi linier sederhana.

Adapun analisa yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Analisa Statistik Deskriptif

Analisa Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa suatu data kemudian menyajikan data tersebut sehingga mudah dipahami. Penarikan kesimpulan statistik deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Kumpulan data yang digunakan untuk analisa statistik deskriptif meliputi keseluruhan sektor – sektor yang

menyumbang PAD. Berdasarkan ruang lingkup bahasannya. Statistik deskriptif yang akan dibahas meliputi :

- a. Kontribusi sektor – sektor penyumbang PAD berdasarkan nilai kontribusinya baik dalam rupiah maupun dalam persen.
- b. Ukuran nilai pusat PAD dan sektor - sektor penyumbangnya yang meliputi nilai rata – rata serta nilai kontribusi minimum dan maksimum pada masing – masing sektor.

2. Model Korelasi

Analisa korelasi digunakan untuk mencari keeratan hubungan antara dua variabel yaitu korelasi yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor perikanan dan sektor – sektor lainnya, rumus untuk uji korelasi adalah :

$$R_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{(\sum x_i^2)(\sum y_i^2)}}$$

Dimana :

Y_i = PAD Kabupaten Lamongan tahun 2002 – 2006 (dalam rupiah)

X_i = Kontribusi sektor perikanan dan sektor – sektor lainnya terhadap PAD tahun 2002 – 2006 (dalam rupiah).

i = tahun ke-

3. Model Regresi Sederhana

Analisa regresi linier sederhana digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada analisis ini satu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang tergolong sebagai variabel terikat adalah PAD Kabupaten Lamongan, sedangkan yang tergolong variabel bebas adalah kontribusi sektor perikanan terhadap PAD. Model matematis dari regresi linier sederhana adalah :

$$Y_i = a + bx_i$$

Dimana :

Y_i = PAD tahun 2002 – 2006 (dalam rupiah)

a = konstanta

b = koefisien parameter untuk sektor perikanan

X_i = sumbangan sektor perikanan (dalam rupiah)

Dalam analisa regresi sederhana akan dilakukan pengujian model yaitu:

1. Uji Regresi Secara Keseluruhan

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji F, pengujian ini dilakukan untuk membuktikan keberadaan pengaruh yang berarti dari variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah data

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 ; $b = 0$; berarti variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat

H_1 : $b \neq 0$; berarti variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat

Kriteria yang digunakan untuk uji F adalah :

- $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$: H_0 ditolak, berarti variabel bebas keseluruhan berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

- $F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$: H_0 diterima, berarti variabel bebas secara keseluruhan tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya proporsi variabel dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas, nilai R^2 ini terletak antara 0 – 1, semakin tinggi nilai R^2 maka semakin baik hasil regresinya, begitu juga sebaliknya.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu hubungan linier yang sempurna atau pasti, maka jika nilai r (korelasi antara variabel bebas) kurang dari R^2 , maka dalam regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas diantara beberapa variabel atau semua variabel.

2. Uji Regresi Secara Parsial

Uji ini dilakukan dengan memakai uji t , pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumusan sebagai berikut :

$$T_{\text{hit}} = r$$

Dimana :

r = koefisien korelasi

n = jumlah data

Uji t menguji apakah suatu hipotesa diterima atau ditolak dimana :

- H_0 ; $b = 0$; berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat
- H_0 ; $b \neq 0$; berarti ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

Untuk menguji signifikansinya maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- $T \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, H_0 diterima, artinya tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dengan variabel terikat.
- $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- $T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Selain dengan menggunakan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independent dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas antara lain :

- jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Hipotesis yang digunakan didalam pengambilan keputusan tersebut adalah :

- H_0 : koefisien regresi tidak signifikan
- H_1 : koefisien regresi signifikan

5. Analisa kontribusi PAD dari sektor perikanan

Analisa ini dilakukan dengan menganalisa hubungan antara potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan dengan besar kecilnya kontribusi terhadap PAD perikanan.

6. Analisa Basis Ekonomi (LQ)

Untuk melihat basis atau tidaknya sektor perikanan terhadap perekonomian di Kabupaten Lamongan, maka digunakan rumus matematika sebagai berikut :

$$LQ = \frac{Vi1 / Vt1}{Vi2 / Vt2}$$

Dimana :

V_{i1} = PAD sektor perikanan Kabupaten Lamongan

V_{t1} = PAD seluruh sektor Kabupaten Lamongan

V_{i2} = PAD sektor perikanan propinsi Jawa Timur

V_{t2} = PAD seluruh sektor propinsi Jawa Timur

3.6 Batasan Variabel dan Cara pengukuranya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Dimana kedua variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Variabel Terikat

Yang tergolong sebagai variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Data PAD ini merupakan data time series dari tahun 2002 – 2006 dalam satuan rupiah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Variabel Bebas

Yang tergolong sebagai variabel bebas meliputi kontribusi sektor – sektor tertentu yang terdapat di Kabupaten Lamongan, dimana sektor – sektor tersebut memberikan nilai kontribusi terhadap PAD. Nilai kontribusi sektor – sektor yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data time series pada tahun 2002 – 2006 dalam satuan Rupiah. Adapun sektor – sektor penyumbang PAD di Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah

Kontribusi PAD yang di peroleh dari sektor Sekreteriat Daerah ini meliputi pemasukan yang berasal dari retribusi Gedung Olah Raga (GOR), retribusi lapangan pertunjukan, retribusi lapangan bulutangkis, retribusi lapangan tennis, retribusi stadion Surajaya, dan retribusi lapangan tontonan. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan Rupiah.

- Keuangan

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor keuangan ini meliputi pemasukan yang berasal dari penerimaan deviden Bank Jatim, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, setoran pengembalian, penerimaan ganti rugi daerah, bantuan dana kontingensi dari pusat dan dana bantuan dari propinsi. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan Rupiah.

- Dispenda (Pendapatan Daerah)

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor Dispenda (Pendapatan Daerah) berasal dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian, retribusi pelayanan pasar, retribus jasa usaha parkir, retribusi ijin gangguan, bagian laba perusahaan milik daerah (PDAM), kontribusi minyak tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan orang pribadi, penerimaan pungutan hasil perikanan, peneriman dari sector pertambangan batu kapur, pajak kendaraan bermotor, pajak pemnafaatan air bawah tanah serta pajak pemanfaatan air permukaan. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan Rupiah.

- Kekayaan Daerah

Kontribusi PAD yang diperoleh dari kekayaan daerah berasal dari penerimaan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan Bank, hasil usaha dinas dan hasil penjualan milik daerah. Keseluruhan kontribusi dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Pertanian

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor pertanian berasal dari penerimaan hasil usaha yang dilakukan oleh dinas serta retribusi usaha penggilingan padi. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Peternakan

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor peternakan berasal dari penerimaan retribusi jasa usaha rumah potong hewan, hasil usaha dinas. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Perikanan

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sector perikanan berasal dari penerimaan hasil usaha dinas, retribusi pelelangan ikan, retribusi ijin usaha. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Perindustrian dan perdagangan (Perindag)

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor Perindag berasal dari penerimaan retribusi ijin usaha. Keseluruhan kontribusi dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Kesehatan

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor kesehatan berasal dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan serta pemasukan dari RSUD. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Pekerjaan Umum (PU)

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor PU berasal dari penerimaan PU pengairan (jasa usaha pemakaian kekayaan daerah), retribusi usaha pendirian bangunan, retribusi ijin usaha konstruksi, hasil usaha dinas dan hasil penjualan milik daerah. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Pariwisata Daerah

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor pariwisata daerah berasal dari penerimaan jasa usaha pemakaian kekayaan daerah serta retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Perhubungan

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor Perhubungan berasal dari penerimaan retribusi dan usaha pengelolaan terminal kota, stasiun. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Kebersihan

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor Kebersihan berasal dari retribusi sampah. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Kehutanan

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor Kehutanan berasal dari retribusi ijin usaha pemanfaatan hutan. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Lain – Lain PAD yang sah

Kontribusi PAD yang diperoleh dari sektor lain – lain PAD yang sah berasal dari hasil bagi laba usaha perusahaan daerah. Keseluruhan kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah.

3.7 Definisi Operasional

Penelitian ini ditekankan pada hal – hal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya PAD yang ada di Kabupaten Lamongan. Didalam interpretasinya seringkali timbul anggapan bahwa nilai PAD sama dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karna itu perlu dijelaskan tentang definisi operasional antara PAD dan PDRB. Definisi opsional tersebut antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain itu ditambahkan bahwa sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain – lain yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari sumber – sumber sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Dan lain – lain PAD yang sah

Lain – lain PAD yang sah diatas meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai dari akibat dari penjualan dan / tau pengadaan barang dan / jasa oleh daerah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilikan asas faktor produksi. Dengan demikian PDRB mencerminkan gambaran *Production Oriented* di suatu daerah tertentu (Arsyad, 1988).

Selain itu dikatakan oleh Suparmoko (1996) bahwa PDRB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dengan harga pasar. Apabila PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah di dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga meningkat.

BAB IV KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Geografi dan Topografi

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada $6^{\circ} 51'54''$ sampai dengan $7^{\circ} 23' 6''$ Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur $122^{\circ} 4' 4''$ sampai $122^{\circ} 33' 12''$ Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih $1.812,8\text{km}^2$ atau 3.78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas $902,4$ km^2 , apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Tuban
- Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan rawa dengan tingkat ketinggian $0-25$ meter seluas $50,17\%$, sedangkan ketinggian $25-100$ meter seluas $45,68\%$, selebihnya $4,15\%$ berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Daratan Kabupaten Lamongan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah berawa yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

4.2 Kependudukan

Menurut data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2005 sebanyak 1.261.972 jiwa, terdiri dari 646.830 jiwa (51,26%) perempuan dan 615.142 jiwa (48,74%) laki-laki. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2005.

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki - Laki		Perempuan	
		Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	≤ 14	170.087	51,26	151.617	23,44
2	15 – 64	407.040	66,17	426.092	67,42
3	≥ 65	38.015	6,18	59.121	9,14
	jumlah	646.830	51,26	615.142	48,74

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, 2005.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Lamongan sebagian besar adalah berada pada kelompok umur 15 – 64 tahun baik jenis kelamin laki – laki maupun perempuan yang mana kelompok umur tersebut adalah tergolong umur produktif untuk bekerja.

4.2 Usaha Perikanan

Jenis usaha perikanan di Kabupaten Lamongan terdiri dari: usaha penangkapan, usaha budidaya dan usaha pengolahan, untuk mengetahui lebih jelas tentang produksi usaha perikanan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Table 2. Jumlah produksi usaha perikanan

jenis usaha	Produksi (ton)	Persentase (%)
Penangkapan		
a. Laut	39.934,38008	94,7
b. Perairan Umum	2..227,940	5,3
Total	42.162,32008	100
Budidaya		
a. Tambak	2.372,800	7,8
b. Kolam	795,445	2,63
c. Sawah Tambak	26.979,752	89,49
Total	30.147.997	100
Pengolahan		
a. Pemindangan	3.006	7,5
b. Pengasinan/Pengeringan	10.142	25,39
c. Pengasapan	10,5	0,02
d. Pembuatan Terasi	4	0,01
e. Pembuatan Petis	9	0,02
f. Pembuatan Tepung Ikan	480	1,2
g. Pembuatan Krupuk Ikan	3.500	0,01
h. Pembekuan	10.205	25,55
Total	39.940	100

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2004

Hasil produksi dari jenis usaha perikanan tangkap pada tahun 2004 sebesar 42.162,32008 Ton, dengan produksi terbesar berasal dari kegiatan penangkapan di Perairan laut yaitu sebesar 39.934,38008 Ton atau 94,7 % dari total produksi jenis usaha penangkapan. Jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah Tongkol, Ekor Kuning, Layang, Tengiri.

Hasil produksi pada usaha budidaya pada tahun 2004 sebesar 30.147.997 ton dengan hasil produksi terbesar berasal dari kegiatan usaha budidaya sawah tambak yaitu sebesar 26.979,752 Ton atau 89,49 % dari total produksi dari jenis usaha budidaya. Luas lahan budidaya di Kabupaten Lamongan seluas 25.312,78 Ha, dengan rincian untuk lahan budidaya di sawah tambak seluas 23.602,63 untuk lahan budidaya di tambak seluas 1.380,05 Ha sedangkan untuk lahan budidaya di kolam seluas 330,1 Ha.

Hasil produksi pada usaha pengolahan ikan pada tahun 2004 sebesar 23.940.000 ton, dengan hasil produksi terbesar berasal dari kegiatan pembekuan yaitu sebesar 10.205 Ton atau 25,55 % dari total produksi jenis usaha pengolahan. Jumlah perusahaan pengolahan ikan/udang di Kabupaten Lamongan pada tahun 2004 sebanyak 28 buah, 1 buah perusahaan cold storage, 4 buah perusahaan tepung ikan, 23 buah perusahaan krupuk udang/ikan. Sedangkan jumlah pengolah pada tahun 2004 sebanyak 425 orang yang didominasi usaha pengolahan pengeringan dan pembekuan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Potensi dan jumlah Produksi Usaha Perikanan Kabupaten Lamongan

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan yang optimal pada sumberdaya perikanan yang ada. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada peningkatan produksi, semakin tinggi produksi yang dihasilkan maka semakin tinggi kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis usaha perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan terdiri dari usaha perikanan tangkap, usaha budidaya, usaha pemasaran, usaha pengolahan. Besar produksi masing – masing jenis usaha dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 sedangkan untuk mengetahui besar kontribusi masing – masing jenis usaha dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2. Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2000 – 2002

Jenis usaha	Produksi (ton)				
	2000	Peningkatan (%)	2001	Peningkatan (%)	2002
<u>Perikanan tangkap</u>					
a. Laut	36.976	2	37.715	3,1	38.915
b. Perairan Umum	2.274	5	2.388,3	-4,4	2.281,3
<u>Budidaya</u>					
a. Tambak	1.565,3	53,4	2.402,6	-17,3	1.986,5
b. Kolam	1.210,7	-58,2	505,9	-13	439,9
c. Sawah Tambak	26.414,5	2,4	27.062,9	-1	26.778,6
Jumlah	68.439,5	2,3	70.047,7	0,5	70.401,3

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2007.

Tabel 3. Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2002 – 2004.

Produksi (ton)					
Jenis Usaha	2002	Peningkatan (%)	2003	Peningkatan (%)	2004
<u>Perikanan tangkap</u>					
a. Laut	38.915	-0,6	38.854,2	2,7	39.934,4
b. Perairan Umum	2.281,3	-2,6	2.013,6	10,6	2.227,9
<u>Budidaya</u>					
a. Tambak	1.986,5	3,4	2.326,3	2	2.372,8
b. Kolam	439,9	3,4	779,8	2	795,4
c. Sawah Tambak	26.778,6	-3,1	26.463,4	1,9	26.979,7
Jumlah	70.401,3	0,3	70.437,3	2,6	72.310,2

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2007.

Tabel 4. Kontribusi Tiap Jenis Usaha Perikanan Tahun 2002 – 2004.

Jenis usaha	Produksi (%)				
	2000	2001	2002	2003	2004
<u>Perikanan tangkap</u>					
a. Laut	54,02	53,82	55,27	53,16	55,22
b. Perairan Umum	3,32	3,4	3,24	2,85	3,08
<u>Budidaya</u>					
a. Tambak	2,28	3,2	2,82	3,3	3,28
b. Kolam	1,76	0,72	0,62	1,1	1,09
c. Sawah Tambak	38,5	38,21	38,03	37,5	37,31
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa secara umum jumlah produksi perikanan dari tahun ketahun (2000 – 2004) mengalami peningkatan, Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 2,6 %. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar diberikan oleh jenis usaha perikanan tangkap laut yaitu rata – rata 54,3% pertahun dari produksi total.

5.1.1 Potensi dan Jumlah Produksi Usaha Perikanan Tangkap

Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan memiliki potensi usaha perikanan di perairan laut cukup besar salah satunya adalah panjang pantai yang mencapai 47 km². Usaha penangkapan ikan laut di Kabupaten Lamongan terpusat di perairan Laut Jawa pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 (lima) Tempat Pendaratan Ikan (TPI), yaitu mulai dari arah timur ke barat (Weru, Kranji, Brondong, Labuhan dan Lohgung). Dilihat dari produksinya paling tinggi adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mencapai kurang lebih 100 ton/hari, dibandingkan dengan keempat pangkalan pendaratan ikan yang lain yaitu Weru, Kranji, Labuhan dan Lohgung yang hanya mencapai 10 ton/hari. Jumlah *fishing base* yang terdapat di Kabupaten Lamongan ada 16 buah lokasi, di Kecamatan Paciran ada 12 (dua belas) yaitu : di Desa Weru Lor, Sidokumpul, Weru, Paloh, Sidokelar, Kemantren, Banjarwati, Kranji, Tunggul, Paciran, Kandang Semangkon, dan Blimbing. Sedangkan di Kecamatan Brondong ada 4 (empat) yaitu : Brondong, Sedayu Lawas, Labuhan, dan Lohgung. Diantara *fishing base* tersebut 5 diantaranya juga merupakan pangkalan pendaratan ikan yaitu : Lohgung, Labuhan, Brondong, Kranji dan Weru.

Potensi lainya yang mendukung usaha penangkapan ikan di Kabupaten Lamongan adalah kondisi alamnya yang cocok untuk pertumbuhan ikan salah satu potensi tersebut adalah Ekosistem terumbu karang, ekosistem tersebut mempunyai manfaat yang bermacam-macam, disamping menunjang produksi perikanan, Secara alami keberadaan terumbu karang dapat melindungi pantai dari bahaya abrasi. Demikian pula *break water* alami ini juga berfungsi untuk melindungi *back reef* dari gelombang besar. Produktifitas perikanan di ekosistem terumbu karang atau di perairan terumbu

karang sangat tinggi, sehingga memungkinkan perairan ini merupakan tempat pemijahan (*spawning ground*), pengasuhan (*nursery ground*), mencari makan (*feeding ground*) dari kebanyakan ikan. Di Kabupaten Lamongan terdapat terumbu karang di 3 (tiga) lokasi yaitu : Desa Tunggul, Desa Kemantren, dan Kandang Semangkon, dengan luas total kurang lebih 11,5 km². Vegetasi mangrove yang merupakan salah satu unsur kawasan lindung mempunyai peranan yang cukup penting pada kawasan pantai. Karena hutan mangrove disamping berfungsi sebagai daerah penyangga (filter terhadap mikroorganisme penyebab penyakit pada udang atau ikan yang dibawa oleh melalui air, perangkap sedimen dan penyerap bahan pencemar), juga merupakan daerah asuhan (*nursery ground*) bagi anak ikan dan udang. Hutan mangrove banyak tumbuh di pantai, terutama pada tebing kiri kanan sungai dan sepanjang pantai.

Produksi hasil tangkapan perikanan di wilayah Kabupaten Lamongan, Laut utara Jawa Timur sebagai berikut :

1. Produksi ikan permukaan didominasi oleh jenis ikan layang, yaitu mencapai 24,48 %, produksi ikan dasar di dominasi oleh ikan Kuningan sebesar 20,55 %, produksi ikan karang di dominasi oleh ikan bambangan sebesar 3,52%, produksi cumi-cumi sangat rendah yaitu: sebesar 0,74%, begitu pula untuk produksi udang yang mencapai 0,28%.
2. Komposisi produksi ikan-ikan permukaan (pelagis) mencapai 51,14% yang tidak jauh beda dengan produksi ikan dasar (demersal), sehingga aktifitas dan lapangan kerja usaha perikanan pelagis dan demersal di perairan Laut Jawa keduanya memegang peranan penting terhadap perolehan produksi ikan, lapangan kerja dan pendapatan nelayan.

3. Dengan tersedianya bahan baku industri, dari jenis ikan yang cukup, sekalipun relative bervariasi, maka perikanan laut di wilayah Kabupaten Lamongan, Laut utara Jawa Timur menunjukkan tipe perikanan multi spesies yang sebenarnya. Kegiatan usaha pengolahan ikan skala industri belum berkembang, namun lapangan kerja pengolahan ikan skala kecil cukup berkembang.

Berdasarkan analisa oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, menggunakan pendekatan model Schaefer dan Fox, hasil perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Analisa model Schaefer

- Jumlah effort optimum yang mempertahankan stok ikan pada kondisi keseimbangan (MSY : *Maximum Sustainable Yield*) adalah 17.452 trip/tahun atau setara dengan 727 unit/tahun standarisasi alat tangkap purse seine.
- Jumlah hasil tangkap maksimum yang mempertahankan stok biomas pada kondisi keseimbangan adalah 38.590 ton/tahun dengan hasil tangkap per unit usaha (CPUE : *Catch per Unit Effort* } adalah 2,211 ton/unit/tahun.
- Berdasarkan pendekatan model Schaefer, maka dapat dikatakan bahwa stok biomass perairan utara Kabupaten Lamongan mengalami *over fishing* pada tahun 2002.

2. Analisa model Fox

- Jumlah effort optimum yang mempertahankan stok ikan pada kondisi keseimbangan (MSY) adalah 21.048 trip/tahun atau 887 unit/ tahun standarisasi alat tangkap purse seine.
- Jumlah hasil tangkap maksimum yang mempertahankan stok biomass pada kondisi keseimbangan adalah 39.152 ton/tahun dengan hasil tangkap per unit usaha (CPUE) adalah 1,860 ton/unit/tahun.

- Berdasarkan pendekatan model Fox, maka dapat dikatakan bahwa stok total biomas perairan utara Kabupaten Lamongan berada di titik kritis pada kondisi keseimbangan.

Berdasarkan kedua analisa tersebut di atas, maka diketahui bahwa pendekatan Schaefer dan Fox memberikan hasil yang hampir sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi perairan yang *over fishing* maka apabila ada penambahan alat tangkap (*effort*) lebih lanjut dalam jangka panjang akan mengakibatkan tidak hanya *over fishing*, tetapi bahkan menyebabkan hilangnya potensi sumberdaya ikan. Sehingga paling tidak jumlah alat tangkap atau *effort* harus dipertahankan seperti sekarang atau bahkan diturunkan untuk sementara waktu agar stok biomass mampu melakukan pemulihan (*recovery*). tetapi analisa diatas berdasarkan hasil tangkapan ikan secara keseluruhan, apabila dianalisa tiap spesies kondisi perairan di Kabupaten Lamongan belum dalam taraf *over fishing*.

Dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan laut, peran serta nelayan sangat dibutuhkan, oleh karna itu diperlukan tenaga nelayan yang terlatih untuk meningkatkan pemanfaatan potensi perairan laut yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk mengetahui jumlah pertumbuhan nelayan menurut kategori nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan laut Kabupaten Lamongan pada tahun 2003 – 2004 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah dan Pertumbuhan Nelayan di Kabupaten Lamongan Tahun 2003-2004.

No	Kategori nelayan	Jumlah nelayan		Pertumbuhan	
		2003	2004	orang	%
1	Tetap	18.345	16.940	-1405	-7,6
2	Sambilan	458	2.298	1840	401,7
3	Andon	3.439	3.320	-119	-3,5
4	Kadang - kadang	680	1.249	569	83,7
	jumlah	22.930	23.807	877	3,8

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

Dari table 5, dapat dijelaskan jumlah nelayan pada tahun 2003 sampai tahun 2004 secara umum jumlah nelayan mengalami peningkatan sebanyak 877 orang atau 3,82 %. Didalam melakukan kegiatan penangkapan di perairan laut, para nelayan menggunakan armada sebagai salah satu sarana pendukungnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah armada penangkapan di perairan laut Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah dan Pertumbuhan Armada Penangkapan Perikanan di kabupaten Lamongan Tahun 2002 – 2003.

no	Jenis armada	Jumlah armada (unit)		Pertumbuhan	
		2002	2003	Unit	%
1	Motor tempel (0 – 5) PK	2.315	2.315	0	0
2	Motor tempel (5 – 10) PK	2.078	2.078	0	0
3	Motor tempel (10 – 20) PK	992	992	0	0
	Jumlah	5.385	5.385	0	0

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa secara umum jumlah armada penangkapan tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena harga armada penangkapan yang tidak terjangkau oleh nelayan. Selain membutuhkan armada penangkapan yang memadai, untuk melakukan kegiatan penangkapan di laut secara

optimal dibutuhkan juga adanya fasilitas peralatan penangkapan di laut. Adapun jenis alat tangkap yang berkembang di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel.7. Jumlah dan Pertumbuhan Alat Tangkap Berdasarkan Jenisnya Tahun 2002 - 2004

No	Jenis alat tangkap	Jumlah alat tangkap (unit)		Pertumbuhan	
		2002	2004	unit	%
1	Payang besar	4.137	4.129	-8	0.19
2	Purse seine	371	271	-100	26.95
3	J.insang hanyut	210	295	85	40.47
4	J. insang tetap	500	500	0	0
5	Tramel net	595	595	0	0
6	Prawe	2.360	2.360	0	0
7	Lain-lain	233	233	0	0
	jumlah	8.306	8.383	77	0.92

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan,2004

Secara umum jumlah alat tangkap pada tahun 2004 adalah 8.383 unit. Jika dibanding dengan tahun 2002 yaitu sebesar 8.306 unit, berarti bahwa jumlah alat tangkap mengalami peningkatan sebanyak 77 unit atau 0,92 %. Dari keseluruhan alat tangkap yang digunakan jumlah terbesar berasal dari jenis alat tangkap payang hal ini disebabkan alat tangkap payang dapat memberikan hasil tangkap yang cukup banyak yakni 4.000 kg/trip/unit.

Tingginya potensi perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan mempengaruhi besarnya produksi perikanan. Adanya sarana dan prasarana usaha perikanan juga mendukung besarnya produksi perikanan. Untuk mengetahui besar produksi usaha perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perjenis Ikan Tahun 200 – 2004.

No	Jenis Ikan	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Layang	7.695200,41	7.687.907	7.691.553,6	8.278.134,86	8.378.130
2	Bawal	88.760,02	228.362	280.308,59	693.804,87	643.800
3	Kembung	447.080,04	564.308	618.854,18	916.183,64	916.180
4	Selar	484.056,04	941.507	996.053,29	1.332.201,43	1.332.200
5	Tembang	3.901.040,34	3.319.731	3.651.551,19	3.883.965,56	3.383.970
6	Tongkol	2.863.920,10	2.920.377	3.252.196,5	2.391.253,94	2.391.970
7	Tengiri	1.104.010,06	1.293.227	1.447.773,93	1.913.003,15	1.913.000
8	Layur	831.960,05	768.825	823.356,59	895.262,55	845.260
9	Manyung	824.400,05	832.473	887.019,28	976.428,69	976.430
10	Cucut	591.616,03	638.927	693.473,31	836.938,88	836.940
11	Cumi-cumi	269.760,02	537.637	592.183,13	936.574,46	936.570
12	Bambangan	1.479.040,30	1.997.572	2.052.218,36	1.817.011,76	1.817.010
13	Udang	84.880,01	117.207	144.480,3	199.271,16	199.270
14	Pari	610.104,03	802.502	857.148,23	1.135.845,62	1.135.850
15	Petek	3.888.840,53	3.883.440	3.887.986,15	2.849.577,61	2.849.580
16	Teri	288.248,02	677.502	732.048,25	975.699,85	975.690
17	Kerapu	158.832,01	139.787	167.060,3	378.615,20	378.610
18	Kuningan	7.516.160,33	7.366.979	7.424.525,1	4.784.329,98	4.784.330
19	Kurisi	132.784,02	142.497	169.770,3	297.449,06	297.450
20	Golok	317.664,03	854.652	1.009.198,3	1.495.262,55	1.495.260
21	Lain - lain	1.552.488,13	1.899.581	1.535.666,92	1.867.417,6	1.867.420
	jumlah	35.130.845,07	37.715.000	38.912.025,8	38.854.232,42	39.934.380

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

- Tahun 2000

Berdasarkan jenis ikan produksi terbesar pada tahun 2000 adalah jenis ikan Layang yaitu sebesar 7.695.200,41 ton atau 21,9% dari produksi total, sedangkan produksi terendah adalah jenis Udang yaitu sebesar 84.880,01 ton atau 0,24% dari produksi total.

- Tahun 2001

Berdasarkan jenis ikan produksi terbesar pada tahun 2000 adalah jenis ikan Layang yaitu sebesar 7.687.907 ton atau 20,38% dari produksi total, sedangkan produksi terendah adalah jenis Udang yaitu sebesar 117.207 ton atau 0,31% dari produksi total.

- Tahun 2002

Berdasarkan jenis ikan produksi terbesar pada tahun 2000 adalah jenis ikan Layang yaitu sebesar 7.691.553,60 ton atau 19,76% dari produksi total, sedangkan produksi terendah adalah jenis Udang yaitu sebesar 144.480,3 ton atau 0,37% dari produksi total.

- Tahun 2003

Berdasarkan jenis ikan produksi terbesar pada tahun 2000 adalah jenis ikan Layang yaitu sebesar 8.278.134,86 ton atau 21,3% dari produksi total, sedangkan produksi terendah adalah jenis Udang yaitu sebesar 199.271,16 ton atau 0,51% dari produksi total.

- Tahun 2004

Berdasarkan jenis ikan produksi terbesar pada tahun 2000 adalah jenis ikan Layang yaitu sebesar 8.378.130 ton atau 20,97% dari produksi total, sedangkan produksi terendah adalah jenis Udang yaitu sebesar 199.270 ton atau 0,49% dari produksi total.

Besar kecilnya produksi selain dipengaruhi potensi alam yang ada juga dipengaruhi faktor – faktor yang lain yaitu jumlah armada, jumlah alat tangkap, jumlah nelayan. Untuk mengetahui perkembangan jumlah produksi dan besarnya faktor produksi yang mempengaruhinya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Produksi dan Jumlah Faktor Produksinya (Nelayan, Armada, Alat tangkap)

tahun	Jml Nelayan (orang)	Jml Armada (unit)	Jml Alat (unit)	Jml Produksi (ton)	Peningkatan (%)
2000	22.285	5.125	4.143	36.976,002	
2001	22.730	5.345	8.306	37.715	1,99
2002	22.930	5.385	8.306	38.915,025	3,12
2003	22.930	5.385	8.306	38.854,232	0,15
2004	23.807	5.385	8.383	39.934,380	2,78

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

- Tahun 2001

Produksi perikanan dari kegiatan penangkapan di laut sebesar 37.715 ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,99% dari produksi tahun sebelumnya. Peningkatan ini di sebabkan meningkatnya jumlah nelayan sebanyak 445 orang dan jumlah armada sebanyak 220 unit serta jumlah alat tangkap yang digunakan bertambah sebanyak 4.163 unit.

- Tahun 2002

Produksi perikanan dari kegiatan penangkapan di laut sebesar 38.915,025 ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,12% dari produksi tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah nelayan sebanyak 200 orang dan jumlah armada sebanyak 40 unit walaupun jumlah alat tangkap tidak mengalami perkembangan.

- Tahun 2003

Produksi perikanan dari kegiatan penangkapan di laut mengalami penurunan sebesar 0,15% dari produksi tahun sebelumnya walaupun jumlah nelayan dan armada serta alat tangkap tidak mengalami perkembangan.

- Tahun 2004

Produksi perikanan dari kegiatan penangkapan di laut mengalami peningkatan sebesar 2,78% dari produksi tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah nelayan sebanyak 877 orang dan alat tangkap yang digunakan bertambah 77 unit walaupun jumlah armada tidak mengalami perkembangan.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, adapun faktor- faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi penangkapan adalah penurunan frekwensi penangkapan secara kumulatif sebagai dampak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak terutama solar serta adanya kecenderungan penurunan populasi ikan yang diakibatkan adanya degradasi kualitas sumberdaya perikanan baik yang berupa daerah tangkapan (fishing ground) maupun kualitas perairan laut.

5.1.2 Potensi dan Jumlah Produksi Usaha Perikanan di Perairan Umum

Perairan sungai merupakan perairan yang penting dalam usaha peningkatan produksi hasil perikanan di perairan umum. Di Kabupaten Lamongan terdapat 2 buah sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo yang panjangnya mencapai 65 km membentang mulai dari Desa Babat sampai Desa Panggang dan sungai Godang yang panjangnya mencapai 2 km. Sungai – sungai yang bermuara di Laut Jawa antara lain : Sungai Lohgung, Sungai Suetan, Sungai Suwuk, Sungai Gayaran, Sungai Tunggul, selain sungai – sungai tersebut masih banyak sungai kecil lainnya seperti Sungai Boden, Deket, Keputren, Dapur, Blawi dll.

Selain perairan sungai di Kabupaten Lamongan juga terdapat perairan rawa yang luasnya 7.087 Ha yang tersebar di 9 Kecamatan sebagian besar tersebar di wilayah Lamongan bagian tengah utara. Untuk lebih jelasnya mengenai daerah sebaran perairan rawa dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Daerah Sebaran Perairan Rawa di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Babat	171
2	Pucuk	300
3	Sukodadi	110
4	Turi	65
5	Kalitengah	328
6	Karanggeneng	63
7	Sekaran	1.085
8	Laren	4.965
	Jumlah	7.087

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2007.

Jenis perairan umum yang lain adalah perairan waduk, selain berfungsi sebagai penyedia kebutuhan air untuk keperluan sehari – hari juga berfungsi sebagai daerah tangkapan ikan. Luas perairan waduk di Kabupaten Lamongan adalah 3.068 Ha yang tersebar 18 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya mengenai daerah sebaran perairan waduk dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Daerah Sebaran Perairan Waduk di Kabupaten Lamongan.

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Bluluk	9
2	Mantup	50
3	Kembang Bahu	183
4	Sugio	800
5	Kedungpring	343
6	Modo	57
7	Babat	58
8	Sukodadi	463
9	Lamongan	65
10	Tikung	633
11	Deket	96
12	Galgah	55
13	Karangbinangun	27
14	Turi	65
15	Karanggeneng	40
16	Maduran	37
17	Laren	39
18	Solokuro	8
	Jumlah	3.068

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 2007.

Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan di perairan umum Kabupaten Lamongan masih cukup rendah. Dari data yang dihimpun oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan perkembangan jumlah produksi perikanan di perairan umum sejak tahun 200 – 2004 kurang menunjukkan adanya peningkatan produksi bahkan cenderung mengalami penurunan. Penangkapan ikan di perairan umum hanya didukung oleh armada penangkapan yang kurang modern yaitu hanya mengandalkan jenis armada perahu tanpa motor yaitu perahu papan yang berukuran sedang (2.199 unit) dan perahun papan berukuran besar (126 unit). Adapun perkembangan jumlah produksi perikanan di perairan umum dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Perkembangan Jumlah Produksi Usaha Perikanan di Perairan Umum di Kabupaten Lamongan Tahun 200 - 2004

Tahun	Rawa (ton)	Waduk (ton)	Sungai (ton)	Jumlah (ton)	%
2000	681,224	380,551	1.212,282	2.274,057	
2001	1.229,447	617,659	541,196	2.388,302	5.023840651
2002	1.193,781	581,993	505,530	2.281,304	-4.480086689
2003	724,825	456,993	841,748	2.013,566	-11.73618246
2004	725,548	463,848	1.038,544	2.227,940	10.64648489

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2004

- Tahun 2000

Produksi ikan dari kegiatan penangkapan di perairan umum sebesar 2.274,057 ton kontribusi terbesar berasal dari penangkapan di sungai sebesar 1.212,282 ton atau 53,30% dari produksi total pada tahun 2000.

- Tahun 2001

Produksi ikan dari kegiatan penangkapan di perairan umum pada tahun 2001 sebesar 2.388,302 ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,02% dari tahun sebelumnya, kontribusi terbesar terbesar berasal dari penangkapan di Rawa sebesar 1.229,447 kg atau 51,47% dari produksi total pada tahun 2001.

- Tahun 2002

Produksi ikan dari penangkapan di perairan umum pada tahun 2002 sebesar 2.281,304 ton atau mengalami penurunan sebesar 4,48% dari tahun sebelumnya, kontribusi terbesar berasal dari penangkapan di Rawa sebesar 1.193,781 ton atau 53,32% dari produksi total pada tahun 2002.

- Tahun 2003

Produksi ikan dari penangkapan di perairan umum pada tahun 2003 sebesar 2.013,566 ton atau mengalami penurunan sebesar 11,73% dari tahun sebelumnya,

kontribusi terbesar berasal dari penangkapan di Sungai sebesar 841,748 ton atau 41,8% dari produksi total pada tahun 2003.

- Tahun 2004

Produksi ikan dari penangkapan di perairan umum pada tahun 2004 sebesar 2.227,940 ton atau mengalami peningkatan sebesar 10,64% dari tahun sebelumnya, kontribusi terbesar berasal dari penangkapan di Sungai sebesar 1.038,544 ton atau 51,57% dari produksi total pada tahun 2004.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan, adapun penyebab penurunan produksi usaha penangkapan di perairan umum secara umum adalah rendahnya tingkat curah hujan sehingga membatasi ketersediaan air, selain itu bertambahnya fungsi sungai. Sungai tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi dan irigasi tambak serta sawah tetapi juga sebagai tempat pembuangan limbah baik yang berasal dari rumah tangga maupun yang berasal dari industri. Penggunaan alat tangkap yang masih tergolong sederhana juga menjadi penyebab rendahnya hasil tangkap dari perairan umum.

5.1.3 Potensi dan Jumlah Produksi Usaha Budidaya

Luas areal budidaya di Kabupaten Lamongan adalah 25.322,754 Ha yang terdiri dari tambak (1.380,024 Ha), sawah tambak (23.602,63 Ha) dan Kolam (340,1 Ha). Areal budidaya jenis sawah tambak tersebar di 17 Kecamatan yang sebagian besar berada pada wilayah tengah Kabupaten Lamongan, sedangkan areal tambak tersebar di 2 Kecamatan yang semuanya berada wilayah Lamongan bagian utara atau pesisir untuk budidaya air tawar atau kolam tersebar di 19 Kecamatan. Adapun daerah sebaran areal budidaya di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Daerah Sebaran Budidaya di Kabupaten Lamongan.

No	Kecamatan	Kolam (Ha)	Tambak (Ha)	Luas (Ha)
1	Sukorame	-	-	-
2	Bluluk	3	-	-
3	Ngimbang	12,5	-	-
4	Sambeng	1,5	-	-
5	Mantup	7,5	-	-
6	Kembangbahu	4,5	-	-
7	Sugio	9	-	6,6
8	Kedungpring	5	-	8
9	Modo	8	-	510
10	Babat	23,1	-	399,7
11	Pucuk	-	-	169
12	Sukodadi	8,5	-	1.928,82
13	Lamongan	33	-	83
14	Tikung	20	-	505
15	Sarirejo	-	-	3.480,9
16	Deket	16,5	-	3.905
17	Glagah	25	-	3.664
18	Karangbinangun	-	-	3.856,5
19	Turi	42	-	2.501,11
20	Kalitengah	33	-	1.411
21	Karanggeneng	20	-	199,5
22	Sekaran	48,6	-	159
23	Maduran	-	-	815
24	Laren	-	-	-
25	Solokuro	9,4	-	-
26	Paciran	-	99,65	-
27	Brondong	-	1.280,4	-
	jumlah	340,1	1.380,024	23.602,63

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2007.

Potensi usaha budidaya yang ada di Kabupaten Lamongan adalah kondisi lingkungannya yang mendukung untuk melakukan usaha ini salah satunya yaitu adanya vegetasi mangrove. Vegetasi mangrove merupakan salah satu unsur kawasan lindung mempunyai peranan yang cukup penting pada kawasan pertambakan. Karena hutan mangrove disamping berfungsi sebagai daerah penyangga (filter terhadap mikroorganisme penyebab penyakit pada udang atau ikan yang dibawa oleh melalui air, perangkap sedimen dan penyerap bahan pencemar), juga merupakan daerah asuhan (*nursery ground*) bagi anak ikan dan udang. Ditinjau dari jenis tanahnya, dominasi tanah mangrove di pesisir Kabupaten Lamongan adalah pasir berkarang dan karang berpasir.

Tanah dominasi karang berpasir yang ditumbuhi mangrove ini merupakan keistimewaan tetapi sekaligus juga merupakan kekurangan, karena pada tanah semacam ini sangat sulit dilakukan reboisasi. Oleh karena itu kondisi mangrove disebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Lamongan harus dijaga atau dilindungi dari penebangan liar, karena sulit ditanam kembali.

Jenis tambak di Kabupaten Lamongan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tambak asin, dan tambak payau. Tambak asin seluruh airnya berasal dari laut, tambak payau (sawah tambak) airnya berasal sebagian dari sungai dan sebagian dari laut.

Adapun gambaran nilai fisik dan kimia tanah tambak di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- **Tekstur tanah**

Kondisi fisik tanah dilokasi penelitian secara umum mengandung banyak liat. Semakin tinggi persentase liat, maka porositas tanah semakin kecil dan konduktifitas hidrauliknya semakin kecil pula. Ini berarti bahwa tanah berliat di lingkungan daerah Lamongan dapat menahan hara dan air serta kemantapan agregatnya tinggi.

- **Kimia Tanah**

Keberadaan bahan organik dalam tanah merupakan faktor yang sangat menentukan didalam pengelolaan mintakat tropika, karena bahan organik dapat mempengaruhi upaya perbaikan sifat fisik dan kimia tanah. Dari segi fisik tanah, adanya bahan organik ini dapat memperbaiki tata partikel tanah sehingga daya serap (mengikat) terhadap hara, air dan udara menjadi lebih baik. Bila ditinjau dari segi kimia tanah, bahan organik merupakan pemasok unsur karbon yang merupakan unsur pokok dalam proses pelapukan, sehingga hara dalam tanah lebih tersedia. Analisis kimia tanah secara

lengkap dilakukan terhadap beberapa variable yang sangat menentukan tingkat kesuburan tanah, sehingga mampu menghasilkan sebuah kesimpulan klasifikasi kesuburan wilayah studi. Adapun variabel analisis kimia tanah lengkap tersebut adalah sebagai berikut: Kapasitas tukar kation (KTK), Nitrogen (Ntotal), P tersedia (PBray, P-Olsen), K-dapat ditukar (Kdd), Na dapat ditukar (Na dd), Ca dapat ditukar (Ca dd), Mg dapat ditukar (Mg dd), Bahan Organik C-Organik), pH (H20 dan KC1), Tekstur (Hidrometer). Berdasarkan kondisi kesuburan tambak di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dapat digolongkan mejadi: Subur; Sedang dan Tidak Subur. Adapun wilayah-wilayah tersebut di wakili oleh:

Subur : Tunggul

Sedang : Paciran; Labuhan; Tlogo Sadang; Kandang Semangkon

Tidak Subur : Lohgung; Sedayu Lawas; Tambak Garam Lohgung

Keberadaan nilai suhu, relatif hampir sama, sedangkan kecerahan perairan menentukan tingkat kesuburan. Pada wilayah perairan tambak, kecerahan yang mendukung kesuburan berada pada nilai 20 - 40 cm. Dilihat dari nilai DO, relative mempunyai nilai kesuburan yang tinggi. Jarak tambak terhadap pantai mempunyai pengaruh terhadap salinitas perairan. Tetapi, pada 8 titik pengamatan di lapang jauhnya jarak tidak menentukan rendahnya salinitas. Ternyata rendahnya salinitas ditentukan adanya sumber-sumber air tawar, dan salinitas tertinggi di tujuh lokasi adalah di lahan tambak garam lohgun. Secara keseluruhan kondisi perairan tambak berada pada kategori sedang, kecuah perairan tambak Labuhan berada pada kategori kurang subur. Rendahnya kesuburan dipicu oleh rendahnya nitrat (NOs) dan pospat (P04) di perairan dibawah Nilai Standard kisaran oligotrofik. Berdasarkan pencemaran perairan tambak, dibagi dalam kategori: Ringan; Sedang; Berat; Sangat Berat. Kondisi pencemaran

perairan tambak tergolong berat dan satu lokasi sangat berat (Paciran). Kondisi dan potensi kesuburan tambak ditentukan oleh tiga variable utama yaitu : Kesuburan tanah, Kesuburan perairan, Pencemaran perairan. Oleh karena itu dari hasil analisis laboratorium ketiga variabel diatas dikuantifikasi skoring dengan pembebanan nilai yang logis, maka dapat disimpulkan nilai kelas tambak menjadi 4 kategori kelas yaitu: kelas 1; 2; 3; 4. Kelas 1 terbaik dan kelas 4 terjelek. Secara keseluruhan ada delapan kelompok wilayah yang mewakili lokasi tambak air payau, yang semuanya berada pada kelas 3 kecuali wilayah Telogosadang yang termasuk kelas 2. Adapun tingkat kesuburan tambak di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 14. Tingkat Kesuburan Tambak di Kabupaten Lamongan.

No	Wilayah	kesuburan tanah	kesuburan perairan	tingkat pencemaran	Kelas (keterangan)
1	Paciran	sedang	sedang	sangat berat	3 (cukup baik)
2	Lohgung	tidak subur	sedang	berat	3 (cukup baik)
3	Kandangsemangkon	sedang	sedang	berat	3 (cukup baik)
4	Telogosadang	sedang	sedang	berat	3 (cukup baik)
5	Labuhan	sedang	kurang subur	berat	2 (baik)
6	Tunggul	subur	sedang	berat	3 (cukup baik)
7	Sedayu Lawas	tidak subur	sedang	berat	3 (cukup baik)
8	Tambakgaram Lohgung	tidak subur	sedang	berat	3

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Lamongan, 2007.

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan protein hewani terutama ikan, produksi budidaya di Kabupaten Lamongan dari tahun ketahun cenderung meningkat. Untuk lebih jelasnya jumlah produksi usaha budidaya berdasarkan jenis ikan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Jumlah Produksi Usaha Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2000 – 2004.

jenis ikan	tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Windu	2.802,865	3.696,683	2.538,142	3.248,717	2.293,691
Bandeng	17.687,390	16.422,013	16.541,442	16.525,182	17.862,656
Tawes	5.317,578	5.618,008	5.503,008	5.406,712	5.432,379
Mujair	179,651	228,926	218,856	242,660	160,017
Lele	777,436	380,547	345,513	561,920	573,150
mas/tombro	2.265,708	2.545,569	2.460,569	2.353,213	2.482,785
Gabus	40,884	39,326	39,291	-	-
Nila	-	-	215,754	209,174	300,852
ikan lain	119,116	1.040,426	1.342,425	1.021,963	1.042,467
Jumlah	29.190,629	29.971,498	29.205,000	29.569,541	30.147,997

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004.

- Tahun 2000

Berdasarkan jenis ikan, produksi tertinggi pada tahun 2000 adalah jenis ikan Bandeng yaitu sebesar 17.687,390 ton atau 60,59% dari produksi total pada tahun 2000. sedangkan produksi terendah jenis ikan Gabus yaitu sebesar 40,884 ton atau 0,14% dari produksi total pada tahun 2000.

- Tahun 2001

Berdasarkan jenis ikan, produksi tertinggi pada tahun 2001 adalah jenis ikan Bandeng yaitu sebesar 16.422,013 ton atau 54,79% dari produksi total pada tahun 2001. sedangkan produksi terendah jenis ikan Gabus yaitu sebesar 39,326 atau 0,13% dari produksi total pada tahun 2001.

- Tahun 2002

Berdasarkan jenis ikan, produksi tertinggi pada tahun 2002 adalah jenis ikan Bandeng yaitu sebesar 16.541,442 ton atau 56,63% dari produksi total pada tahun 2002. sedangkan produksi terendah jenis ikan Gabus yaitu sebesar 39,291 ton atau 0,13% dari produksi total pada tahun 2002.

- Tahun 2003

Berdasarkan jenis ikan, produksi tertinggi pada tahun 2003 adalah jenis ikan Bandeng yaitu sebesar 16.525,182 ton atau 55,88% dari produksi total pada tahun 2003. Sedangkan produksi terendah jenis ikan Nila yaitu sebesar 209,174 ton atau 0,7% dari produksi total pada tahun 2003.

- Tahun 2004

Berdasarkan jenis ikan, produksi tertinggi pada tahun 2004 adalah jenis ikan Bandeng yaitu sebesar 17.862,656 ton atau 59,24% dari produksi total pada tahun 2004. Sedangkan produksi terendah jenis ikan Mujair yaitu sebesar 160,017 ton atau 0,53% dari produksi total pada tahun 2004.

Berdasarkan media yang digunakan jenis budidaya yang dilakukan di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis budidaya yaitu budidaya pada kolam, budidaya pada tambak, budidaya pada sawah tambak. Adapun jumlah produksi usaha budidaya berdasarkan jenis media yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah Produksi Usaha Budidaya Berdasarkan Media yang digunakan pada Tahun 2000 – 2004.

tahun	Sawah Tambak (ton)	Kolam (ton)	Tambak (ton)	Jumlah (ton)	%
2000	26.414,529	1.210,750	1.565,350	29.190,629	
2001	27.062,952	505,934	2.402,612	29.971,498	2,675067
2002	26.778,566	439,934	1.986,500	29.205,000	-2,55742
2003	26.463,433	779,808	2.326,300	29.569,541	1,248214
2004	26.379,752	795,445	2.372,800	30.147,997	1,956256

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004.

- Tahun 2000

Produksi ikan dari kegiatan budidaya pada tahun 2000 sebesar 29.190,629 ton, kontribusi terbesar berasal dari kegiatan budidaya sawah tambak sebesar 26.414,529 ton atau sebesar 90,48% dari produksi total pada tahun 2000.

- Tahun 2001

Produksi ikan dari kegiatan budidaya pada tahun 2001 sebesar 29.190,629 ton atau meningkat 2,67% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan budidaya sawah tambak sebesar 27.062,952 ton atau 90,29% dari produksi total pada tahun 2001.

- Tahun 2002

Produksi ikan dari kegiatan budidaya pada tahun 2002 sebesar 29.205 ton atau menurun 2,55% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan budidaya sawah tambak sebesar 26.778,566 ton atau 91,69% dari produksi total pada tahun 2002.

- Tahun 2003

Produksi ikan dari kegiatan budidaya pada tahun 2003 sebesar 29.252,901 ton atau meningkat 1,24% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan budidaya sawah tambak sebesar 26.146,811 ton atau 89,38% dari produksi total pada tahun 2003.

- Tahun 2004

Produksi ikan dari kegiatan budidaya pada tahun 2004 sebesar 29.604,608 ton atau meningkat 1,95% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan budidaya sawah tambak sebesar 26.436,395 ton atau 89,29% dari produksi total pada tahun 2004.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, adapun penyebab menurunnya hasil usaha budidaya pada tahun 2002 adalah adanya penyakit *White Spot* yang menyerang ikan yang dipelihara warga masyarakat disamping itu ada indikasi rendahnya kualitas benih dan tingkat pengolahan lahan yang kurang optimal juga mempengaruhi rendahnya produksi.

5.1.4 Potensi Dan Jumlah Produksi Usaha Pengolahan Hasil Komoditi Perikanan

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang tidak tahan lama atau sering juga disebut dengan istilah *Perisable Food*. Kondisi yang demikian ini disebabkan karena ikan mudah sekali mengalami pembusukan apabila tidak segera mendapat penanganan yang tepat. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya pengolahan dan pengawetan hasil – hasil perikanan, sehingga saat ikan sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pengolahan dan pengawetan ikan dapat dilakukan secara tradisional maupun modern.

Bentuk – bentuk usaha pengolahan ikan yang dilakukan di Kabupaten Lamongan lebih banyak dilakukan secara tradisional. Cara – cara tradisional tersebut antara lain pengeringan, pemindangan, pembuatan terasi dan masih banyak lagi cara lainnya. adapun jumlah produksi usaha pengolahan ikan berdasarkan usaha pengolahan yang dilakukan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 17. Jumlah Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pengolahannya Pada Tahun 2000 – 2004.

Tahun	Pemindangan (ton)	Asin/kering (ton)	Asap (ton)	Terasi (ton)	Petis (ton)	Pembekuan (ton)
2000	2.410,342	-	5,898	-	4,640	17.091,286
2001	2.186,025	-	596,007	-	396,353	19.374,342
2002	3.013,000	10.163	250,000	4	9,200	10.205
2003	3.006,000	10.142	10,500	4	9,200	10.205
2004	3.006,000	10.142	10,500	4	9,000	10.205

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Lamongan, 2004.

Tahun	Krupuk (ton)	Tepung ikan (ton)	Jenis ikan lain (ton)	Jml (ton)	%
2000	-	-	-	19.512,166	
2001	-	-	-	22.552,727	15.5829
2002	3,500	216	80	23.943,700	6.167649
2003	3,500	480	80	23.940,200	-0.01462
2004	3,500	480	80	23.940,000	-0.00084

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004.

- Tahun 2000

Produksi ikan olahan pada tahun 2000 sebesar 19.512,166 ton, jenis olahan tertinggi adalah olahan Pembekuan yaitu sebesar 17.091,286 atau 87,59% dari produksi total pada tahun 2000, sedangkan produksi terendah adalah jenis olahan Petis yaitu sebesar 5,898 ton atau 0,03% produksi total pada tahun 2000.

- Tahun 2001

Produksi ikan olahan pada tahun 2001 sebesar 22.522,727 ton meningkat 3040,561 ton atau 15,58% dari produksi total. Kontribusi terbesar berasal dari jenis olahan Pembekuan yaitu sebesar 19.374,342 atau 86,02% dari produksi total, sedangkan kontribusi terendah berasal dari jenis olahan Petis yaitu sebesar 396,353 atau 1,75% dari produksi total.

- Tahun 2002

Produksi ikan olahan pada tahun 2002 sebesar 23.943,7 ton meningkat 91153,473 ton atau 6.16% dari produksi total. Kontribusi terbesar berasal dari jenis olahan Pembekuan yaitu sebesar 10.205 ton atau 42,62% dari produksi total, sedangkan kontribusi terendah berasal dari jenis olahan Krupuk yaitu sebesar 3,5 ton atau 0,01% dari produksi total.

- Tahun 2003

Produksi ikan olahan pada tahun 2003 sebesar 23.940,2 ton menurun 3,5 ton atau 0,01% dari produksi total. Kontribusi terbesar berasal dari jenis olahan Pembekuan yaitu sebesar 10.205 ton atau 42,62% dari produksi total, sedangkan kontribusi terendah berasal dari jenis olahan Krupuk yaitu sebesar 3,5 ton atau 0,01% dari produksi total.

- Tahun 2004

Produksi ikan olahan pada tahun 2004 sebesar 23.940 ton menurun 0,2 ton atau 0,0008% dibanding produksi total. Kontribusi terbesar berasal dari jenis olahan Pembekuan yaitu sebesar 10.205 atau 42,62% dari produksi total, sedangkan kontribusi terendah berasal dari jenis olahan Krupuk yaitu sebesar 3,5 ton atau 0,01% dari produksi total pada tahun 2004.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, adapun penyebab menurunnya jumlah produksi ikan hasil olahan adalah disebabkan oleh menurunnya suplai bahan baku yang berasal dari hasil tangkapan nelayan di laut, menurunnya produksi usaha budidaya juga menjadi penyebab menurunnya produksi hasil olahan ikan.

Seiring bertambahnya penduduk maka bertambah pula kebutuhan akan pangan salah satunya pangan hasil olahan yang berbahan baku ikan. Meningkatnya permintaan akan pangan hasil olahan berbahan baku ikan maka meningkat pula jumlah pengolah ikan, pada tahun 2004 jumlah pengolah ikan dengan cara tradisional di Kabupaten Lamongan sebanyak 425 orang sedangkan yang menggunakan cara modern, biasanya dilakukan oleh perusahaan pengolah ikan yang jumlahnya sebanyak 28 perusahaan. Adapun jumlah pengolah dan jumlah perusahaan pengolahan dapat dilihat pada Tabel 18:

Tabel 18. Jumlah Pengolah Berdasarkan Jenis Pengolahannya.

No	Jenis pengolahan	Jumlah (orang)
1	Pemindangan	43
2	Pengeringan	104
3	Pengasapan	61
4	Terasi	1
5	Petis	46
6	Tepung ikan	4
7	Kerupuk ikan	23
8	Pembekuan	139
9	Lain – lain	4
	Jumlah	425

Sumber :Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004.

Tabel 19. Jumlah Perusahaan Berdasarkan Jenis Pengolahan

No	Jenis pengolahan	Jumlah (unit)
1	Cold Storage	1
2	Tepung ikan	4
3	Krupuk udang/ikan	23
	Jumlah	28

Sumber:Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ikan hasil olahan maka perlu dilakukan pembinaan bidang pasca panen, mutu produk dan pengolahan hasil perikanan perlu ditingkatkan baik terhadap komoditas ekspor maupun yang dikonsumsi di dalam negeri. Upaya peningkatan pembinaan terhadap bahan baku telah dikembangkan sistem

rantai dingin yang benar disamping faktor sanitasi dan higienies yang harus diperhatikan secara serius oleh semua pihak pengolahan.

Bagi pengolahan hasil perikanan yang bersifat tradisional pembinaanya dilakukan melalui peningkatan kemampuan pengolah dan pengelolaan dan teknik pengolahan hasil perikanan. Hal ini dilakukan dengan memberikan latihan, demonstrasi dan juga penyuluhan serta introduksi atau diversifikasi pengolahan. Dengan pembinaan tersebut, ketrampilan nelayan dan pengolah mempunyai alternatif dalam memasarkan hasil produksi. Dengan produk akhir yang semakin baik dan program diversifikasi maka diharapkan konsumsi ikan akan meningkat. Sedang bagi unit – unit pengolahan modern, peningkatan *Good Manufacturing Practice* (GMP) perlu semakin ditingkatkan agar pangsa pasar komoditas perikanan ke mancanegara tetap berkembang, baik volume maupun nilainya.

5.1.5 Sektor Pemasaran Komoditi Hasil Perikanan

Distribusi pemasaran komoditi hasil perikanan di Kabupaten Lamongan dilakukan melalui pasar lokal dan pemasaran antar kota. Komoditi hasil perikanan yang dipasarkan melalui pasar lokal antara lain, ikan – ikan segar dan ikan – ikan yang diolah secara tradisional. Untuk mengetahui jumlah ikan yang dikirim keluar daerah dan jumlah ikan yang masuk dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Pemasaran Komoditi Hasil Perikanan Tahun 2000 – 2004.

tahun	Ikan yang dikirim keluar daerah (ton)	%	Ikan yang masuk (ton)
2000	8.513,695		-
2001	27.908,200	227,80	-
2002	159.107,992	470,11	-
2003	80.638,748	-49,31	19.318,049
2004	70.848,328	-12,14	13.750,33

Sumber :Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

Selama tahun 2000 – 2004 jumlah ikan yang dikirim keluar daerah fluktuatif dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 227,8 %. Ikan yang dikirim keluar daerah berupa ikan segar dan juga ikan olahan dengan daerah tujuan Bandung, Jakarta, Semarang dan Surabaya. Sedangkan jumlah ikan yang masuk pada tahun 2003 yang berasal dari luar daerah sebesar 19.318,049 ton dan pada tahun 2004 sebesar 13.750,33 ton kesemuanya berupa ikan segar dengan daerah asal Banyuwangi, Trenggalek, Jember, Malang.

Adanya jenis ikan segar yang didistribusikan masuk ke Kabupaten Lamongan lebih rendah dibanding jumlah ikan yang didistribusikan ke luar daerah, menunjukkan bahwa jumlah permintaan ikan dari daerah luar daerah Lamongan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah permintaan ikan dari daerah Lamongan. Untuk menunjang pemasaran lokal maupun di luar daerah Lamongan, diperlukan sarana dan prasarana pemasaran yang memadai, Melalui pemasaran yang baik nantinya akan turut mendorong para nelayan, pembudidaya ikan dan para pelaku industri pengolahan perikanan untuk dapat menaikkan produksinya. Sarana dan prasarana yang dimaksud antaralain adanya pasar umum, TPI beserta peralatan penunjang lainnya yaitu Cold Box, garam, Dry Ice dan lain – lain. Kabupaten Lamongan memilki empat buah Tempat Pelalangan Ikan (TPI), yaitu TPI Brondong, TPI Kranji, TPI Weru, TPI Lohgung.

5.1.6 Tingkat Konsumsi Ikan

Perkembangan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lamongan dari tahun ketahun menunjukkan perkembangan walaupun belum memenuhi target nasional, tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Lamongan yang tertinggi adalah pada tahun 2004. Agar target nasional dapat dipenuhi maka perlu dilakukan penyuluhan tentang makan ikan secara intensif, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan. Adapun Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2000 – 2004.

Jenis	2000	2001	2002	2003	2004
Pencapaian daerah	18,79	19,13	19,75	19,80	19,83
Target nasional	26,5	26,5	30	30	30
Prosentase (%)	70,9	72,2	65,8	66	66,10

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

5.1.7 Tingkat Pendapatan Petani Ikan/Nelayan

Salah satu indikator perekonomian suatu daerah adalah tingkat pendapatan perkapita penduduk, semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita maka semakin berkembang perekonomian suatu daerah. Adapun tingkat pendapatan Nelayan dan Petani ikan dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Tingkat Pendapatan Berdasarkan Jenis Matapencanharian Tahun 2000 – 2004.

Jenis mata pencaharian	Tahun					
	2000	%	2001	%	2002	%
Nelayan	2.127.332	2	2.169.990	13,06	2.496.040	-3,58
Petani ikan	7.292.705	14,84	8.375.341	-4,89	7.965.450	-7,66

Jenis mata pencaharian	Tahun		
	2003	%	2004
Nelayan	2.406.552	210,9	7.482.260
Petani ikan	7.354.508	-66,85	2.437.289

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

Berdasarkan pada tabel 21 terlihat bahwa pendapatan nelayan dari tahun ketahun (2000 – 2004) cenderung mengalami peningkatan. Pendapatan terbesar diperoleh pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp.27.482.260,00 atau meningkat 210,9% dan terendah pada tahun 2000 sebesar Rp.2.127.332,00 sedangkan pendapatan Petani ikan cenderung menurun, pendapatan terbesar diperoleh pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp.8.375.341,00 dan terendah pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp.2.437.289,00.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, adapun salah satu penyebab menurunnya pendapatan nelayan dikarenakan adanya penurunan kontribusi produksi usaha penangkapan dan fluktuasi tingkat harga komoditi hasil perikanan laut. Demikian pula pendapatan petani ikan, hal ini disebabkan adanya indikasi rendahnya kapasitas nilai tukar petani ikan terutama nilai hasil produksi tidak sebanding dengan biaya produksi yang salah satu diantaranya adalah meningkatnya harga saprodi dan fluktuasi tingkat harga komoditi.

5.1.8 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan yang tinggi di Kabupaten Lamongan menarik minat orang untuk memanfaatkannya membuka lapangan usaha, dengan semakin meningkatnya jumlah lapangan usaha diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Lamongan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkata penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Berdasarkan Jenis Usaha Perikanan Tahun 2000 – 2004.

tahun	Jenis usaha perikanan (orang/tahun)				
	Petani ikan	nelayan	pengolah	jumlah	%
2000	30.255	22.285	385	52.925	
2001	31.255	22.730	392	54.377	2,7
2002	31.403	22.930	405	57.338	5,4
2003	31.885	23.185	434	57.479	0,24

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2003.

Dari aspek perkembangan tenaga kerja pada usaha perikanan secara kumulatif dari tahun ketahun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, hal ini menggambarkan bahwa usaha dibidang perikanan masih memberikan peran/kontribusi terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kontribusi terbesar berasal dari jenis usaha petani ikan yaitu pada tahun 2000 sebesar 57,16% dari total tenaga kerja yang terserap disektor perikanan.

5.2 Pembangunan Sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan

Dengan diberlakukanya Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan keluasan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan melaksanakan tugas pembantuan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

optimalisasi potensi sumberdaya yang ada. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam membangun serta meningkatkan daya guna potensi daerah dan keanekaragaman sumberdaya daerah yang termasuk didalamnya pembangunan dibidang perikanan dan kelautan dengan berbasis pada peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan maka pengelolaan perikanan harus dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pengembangan perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan pelaksanaannya diupayakan dengan pendekatan agribisnis berbasis pedesaan yang ditujukan untuk mengubah dari usaha tani subsistem menjadi usaha tani yang bersifat komersial yang mampu menghasilkan komoditas perikanan yang mempunyai nilai tambah atas permintaan pasar dan mempunyai keunggulan kompetitif.

Penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk berbagai kegiatan seperti tambak, agriindustri, pariwisata, daerah tangkapan ikan (fishing ground) dan lain – lain selain didasarkan pada kepentingan pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan – kebutuhan masyarakat sebagai pengguna sumberdaya. Untuk mewujudkan masarakat yang makmur dan sejahterah maka pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan arah kebijakan pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan yang berorientasi pada :

1. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan pada wilayah perairan laut, dengan strategi dan prioritas :a) peningkatan pembinaan nelayan dan pengawasan sumberdaya kelautan ; b) peningkatan sarana dan prasarana pendaratan

- ikan; c) peningkatan jangkauan daerah operasi penangkapan; d) peningkatan pengkajian mutu hasil perikanan laut; e) peningkatan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir.
2. Terwujudnya pengembangan usaha budidaya perikanan dengan strategi dan prioritas : a) pengembangan budidaya laut dan air payau; b) peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan; c) pengembangan agribisnis komoditi perikanan; d) peningkatan aspek permodalan usaha tani budidaya; e) peningkatan mutu intensifikasi budidaya ikan; f) pemberdayaan penangkaran benih ikan air tawar.
3. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan pengembangan produk, dengan strategi dan prioritas : a) peningkatan diversifikasi produk perikanan; b) introduksi teknologi pengolahan ikan; c) pengembangan kemitraan produsen dan pengusaha.
4. Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum, dengan strategi dan prioritas : a) pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan perairan umum; b) introduksi teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Kegiatan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan utamanya di prioritaskan pada pengembangan usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan, pemberdayaan nelayan dan petani ikan, konservasi lingkungan, dengan alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan pada tahun 2003 sebesar Rp. 980.470.000,- . Hasil – hasil pembangunan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Jenis Pembangunan dan Alokasi Dana pada tahun 2003.

Jenis Pembangunan	Alokasi Dana (Rp)
<u>Pengembangan sarana dan prasarana</u>	
1. Penyediaan peralatan pabrik es	164.755.000,00
2. Pengadaan peralatan TPI Paloh	10.000.000,00
3. Pembangunan pagar dan perluasan parkir kantor DKP	15.000.000,00
4. Pengadaan sarana prasarana kantor DKP	20.000.000,00
5. Pembangunan Talut Banjarwati	698.215.000,00
Total	907.970.000,00
<u>Konservasi lingkungan</u>	
1. Pembuatan terumbu karang buatan	35.000.000,00
Total	35.000.000,00
<u>Pengembangan usaha perikanan</u>	
1. Operasional BBI Kalen	15.000.000,00
2. Operasional POSKAMLA	11.000.000,00
Total	26.000.000,00
<u>Pemberdayaan Nelayan</u>	
1. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengembangan Usaha Budidaya	17.500.000,00
Total	17.500.000,00

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2004

Disamping pelaksanaan kegiatan pembangunan pada sektor Perikanan dan Kelautan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan, kegiatan pembangunan sektor Perikanan dan Kelautan juga mendapat dukungan APBD 1 dan APBN yang meliputi : (1) pengentasan kemiskinan bidang perikanan dan (2) Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Pengembangan Usaha Budidaya (PPMP-BUD).

Kegiatan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan pada tahun 2004 diprioritaskan pada pengembangan usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan, konservasi lingkungan dengan alokasi dana yang bersumber dari

APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.597.979.000,00. Hasil – hasil pembangunan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Jenis Pembangunan dan Alokasi Dana pada Tahun 2004.

Jenis Pembangunan	Alokasi dana (Rp)
<u>Pengembangan sarana dan prasarana</u>	
1. Rehabilitasi dermaga Weru	15.000.000,00
2. Pengadaan peralatan TPI Kraji	8.000.000,00
3. Pembuatan saluran air TPI Brondong	75.000.000,00
4. Pengadaan timbangan ikan	50.000.000,00
5. Pembangunan kantor DKP, pagar depan, pavingstone, tempat parkir	62.225.000,00
6. Pengerukan pelawangan perahu nelayan ikan	15.000.000,00
7. Pembangunan kantor nelayan	35.000.000,00
Total	260.225.000,00
<u>Pengembangan usaha perikanan</u>	
1. Pemberian pinjaman modal kepada kelompok petambak ASPELA	375.000.000,00
2. Pemberian pinjaman modal kepada nelayan melalui KUD Brondong	350.000.000,00
3. Introduksi teknologi agroindustri	25.000.000,00
Total	750.000.000,00
<u>Konservasi lingkungan</u>	
1. Penanaman terumbu karang buatan	40.000.000,00
Total	40.000.000,00
<u>Pemberdayaan masyarakat</u>	
1. operasional kelompok Rukun Nelayan dan HNSI	42.000.000,00
2. Pembinaan kelompok pembudidaya ikan, nelayan	15.000.000,00
Total	57.000.000,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2004

Disamping pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada bidang perikanan dan kelautan dibiayai dari APBD Kabupaten Lamongan pembangunan bidang perikanan dan kelautan juga mendapat dana dari APBN yang untuk kegiatan PEMP (Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir) berlokasi di Kecamatan Brondong dengan dana sebesar Rp. 1.520.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dana Ekonomi Produktif (DEP) penyuluhan dan penyebaran informasi, pengembangan usaha, administrasi proyek dan pengadaan alat data.

5.3 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di dalam era otonomi daerah, setiap Kabupaten diharapkan mampu mencari sumber – sumber pendapatan daerah sendiri dengan menggali segala potensi yang ada didaerahnya. Salah satu sumber pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dengan potensi daerah sebagai wujud dari adanya desentralisasi.

Dikatakan pula oleh Ambardi dan Prihawantoro (2002), bahwa PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber – sumber penerimaan murni daerah dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dari pengertian PAD tersebut dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber – sumber keuangannya, maka akan semakin besar pula kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Sebaliknya besarnya ketergantungan daerah terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kecilnya sumber PAD yang dapat dipungut, akan membatasi ruang gerak dan kemampuan daerah itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

Sektor perikanan merupakan salah satu sumber penyumbang PAD di Kabupaten Lamongan. Kondisi Kabupaten Lamongan yang memiliki kekayaan sumberdaya perikanan yang tinggi diharapkan dapat menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu

sektor andalan penyumbang PAD dengan nilai kontribusi yang tinggi. Adapun besar kontribusi sektor perikanan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PAD Tahun 2002 – 2006.

Tahun	PAD Kab. Lamongan (Rp)	PAD Sektor Perikanan (Rp)	Persentase (%)
2002	23.794.380.379.02	440.690.685	1,85
2003	32.314.669.959.97	638.342.340	1,97
2004	34.010.841.136.84	543.192.975	1,59
2005	40.067.207.856.37	1.339.265.300	3,34
2006	42.441.553.192.83	660.335.000	1,55

Sumber : Dispenda Kabupaten Lamongan, 2006

Dari tabel 18 diatas dapat diketahui kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Lamongan dari tahun ketahun mengalami fluktuatif, kontribusi terbesar diberikan pada tahun 2005 atau 3,34 % dari total PAD tahun 2005 tetapi kontribusi tersebut bila dibandingkan dengan rata – rata kontribusi 17 sektor penyumbang PAD yang besarnya 5,9 %, kontribusi dari sektor perikanan relatif rendah. Sumber – sumber PAD dari sector perikanan adalah retribusi izin usaha perikanan, retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan hasil – hasil usaha dinas untuk penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat disubbab selanjutnya.

5.3.1 Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi usaha di bidang perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha di bidang perikanan.

Pada tahun 2006, hasil penerimaan PAD sektor perikanan yang berasal dari Retribusi Ijin Usaha Perikanan sebesar Rp.10.000.000,00. dimana obyek dari retribusi tersebut adalah pemberian izin terhadap semua jenis kegiatan usaha perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, struktur dan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu motor tempel dengan alat tangkap :
 - a. Purse seine, sebesar Rp.40.000,00/tahun/unit.
 - b. Payang dan sejenisnya, sebesar Rp.15.000,00/tahun/unit
 - c. Dogol/Cantrang dan sejenisnya, sebesar Rp.20.000,00/tahun/unit.
 - d. Jaring/Gill Net dan sejenisnya, sebesar Rp.20.000,00/tahun/unit.
 - e. Pancing/Long line dan sejenisnya, sebesar Rp.10.000,00/tahun/unit.
 - f. Alat tangkap lainnya, sebesar Rp.10.000,00/tahun/unit.
 - g. Kapal/perahu pengangkut ikan, sebesar Rp.20.000,00/tahun/unit.
2. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan dengan :
 - a. Pembenihan udang :
 1. Kapasitas produksi sampai dengan 2 juta ekor pertahun, sebesar Rp.100.000,00 pertahun.
 2. Kapasitas produksi lebih dari 2 juta ekor pertahun, sebesar Rp.150.000,00 pertahun.
 3. Kapasitas produksi lebih dari 5 juta ekor sampai dengan 10 juta ekor pertahun, sebesar Rp.200.000,00 pertahun.

4. Kapasitas produksi lebih dari 10 juta ekor sampai dengan 15 juta ekor pertahun, sebesar Rp.250.000,00 pertahun.
 5. Kapasitas produksi lebih dari 15 juta ekor sampai dengan 25 juta ekor pertahun, sebesar Rp.300.000,00 pertahun.
 6. Kapasitas produksi lebih dari 25 juta ekor sampai dengan 50 juta ekor pertahun, sebesar Rp.350.000,00 pertahun.
 7. Kapasitas produksi lebih dari 50 juta ekor pertahun, sebesar Rp.400.000,00 pertahun.
- b. Pembenihan ikan :
1. Kapasitas produksi lebih dari 1 juta ekor sampai dengan 5 juta ekor pertahun sebesar Rp.50.000,00 pertahun.
 2. Kapasitas produksi lebih dari 5 juta ekor sampai dengan 10 juta ekor pertahun sebesar Rp.75.000,00 pertahun.
 3. Kapasitas produksi lebih dari 10 juta ekor sampai dengan 15 juta ekor pertahun sebesar Rp.100.000,00 pertahun.
 4. Kapasitas produksi lebih dari 15 juta ekor sampai dengan 25 juta ekor pertahun sebesar Rp.150.000,00 pertahun.
 5. Kapasitas produksi lebih dari 25 juta ekor pertahun sebesar Rp.200.000,00 pertahun.
- c. Pembenihan lainnya seperti kerang – kerangan, ikan air laut, katak, siput dan lainnya sebesar Rp.150.000,00/tahun.
- d. Budidaya ikan semiintensif di air tawar/payau setiap hektar sebesar Rp.25.000,00/tahun.

- e. Budidaya ikan/rumput laut dan lain – lain setiap hektar, sebesar Rp.50.000,00/tahun.
- f. Budidaya ikan intensif di air payau/tawar setiap hektar
3. Untuk kegiatan pengolahan ikan :
 - a. Pengolahan secara tradisional :
 - a. Kapasitas produksi 200 kg sampai dengan 1 (satu) ton perhari sebesar Rp.50.000,00/tahun.
 - b. Kapasitas produksi lebih dari 1 ton sampai 2 ton/hari sebesarRp.75.000,00/tahun.
 - c. Kapasitas produksi lebih dari 2 ton sampai 5 ton/hari sebesar Rp.100.000,00/tahun.
 - d. Kapasitas produksi lebih dari 5 ton/hari sebesar Rp.150.000,00/tahun.
 - b. Pengolahan secara semi modern :
 - a. Kapasitas produksi sampai dengan 5 ton/hari sebesar Rp.200.000,00/tahun.
 - b. Kapasitas produksi lebih dari 5 ton sampai dengan 10 ton/hari sebesar Rp.300.000,00/tahun.
 - c. Kapasitas produksi lebih dari 10 ton/hari sebesar Rp.400.000,00/tahun.
 - c. Pengolahan secara modern :
 1. Kapasitas produksi sampai dengan 5 ton/hari sebesar Rp.300.000,00/tahun.

2. Kapasitas produksi lebih dari 5 ton/hari sampai dengan 10 ton sebesar Rp.400.000,00/tahun.
3. Kapasitas produksi lebih dari 10 ton/hari sebesar Rp.1.000.000,00/tahun.
4. Untuk kegiatan eksploitasi :
 - a. Dengan menggunakan kapal/perahu bermotor dengan ukuran samai 5 GT :
 1. Mengambil barang – barang purbakala sebesar Rp.300.000,00/tahun.
 2. Mengambil barang – barang lain selain barang – barang purbakala setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah sebesar Rp.200.000,00.
 - b. Dengan menggunakan kapal/perahu bermotor dengan ukuran lebih dari 5 GT dampai 30 GT:
 1. Mengambil barang – barang purbakala sebesar Rp.600.000,00/tahun.
 2. Mengambil barang – barang lain selain barang - barang purbakala setelah mendapat ijin Kepala Daerah sebesar Rp.400.000,00/tahun.
 - c. Dengan menggunakan kapal/perahu motor dengan ukuran lebih dari 30 GT:
 1. Mengambil barang – barang purbakala sebesar Rp.1.000.000,00/tahun.
 2. Mengambil barang – barang lain selain barang – barang purbakala setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah sebesar Rp.600.000,00/tahun.
5. Untuk kegiatan eksplorasi laut :
 - a. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran sampai dengan 5 GT sebesar Rp.200.000,00/tahun.
 - b. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran lebih 5 GT sebesar Rp.300.000,00/tahun.

6. Penanaman atau pemancangan sarana di luar pelabuhan :
 - a. Penanaman kabel sebesar Rp.1.000 tiap meter/tahun.
 - b. Penanaman pipa :
 1. Diameter 0 – 20 cm, sebesar Rp.500/meter/tahun.
 2. Diameter lebih dari 20 – 50 cm, sebesar Rp.1000/meter/tahun.
 3. Diameter lebih dari 50 100 cm, sebesar Rp.1.500,00/meter/tahun.
 4. Diameter lebih dari 100 cm, sebesar Rp.2.000,00/meter/tahun.
 - c. Penanaman tiang sebesar Rp.25.000, tiap tiang/tahun.
 - d. Penanaman lainnya sebesar Rp.50.000,00/tahun.
7. Untuk pemasangan rumpon di laut :
 - a. Rumpon tetap dengan bahan buatan sebesar Rp.25.000,00/tahun.
 - b. Rumpon tetap dengan bahan alami sebesar Rp.15.000,00/tahun.
8. Peredaran hasil perikanan :
 - a. Pengangkutan ikan hidup masuk keluar daerah, dikenakan kontribusi sebesar 0,2%/kg dari harga ikan.
 - b. Pengangkutan ikan, ikan hasil olahan masuk maupun keluar daerah dikenakan kontribusi sebesar 0,3%/kg dari harga ikan.

5.3.2 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Tempat pelelangan ikan adalah suatu tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang. Retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan adalah :

- a. Mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan/petani ikan maupun konsumen.
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan/petani ikan.
- d. Memberdayakan koperasi nelayan/petani ikan.
- e. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan.
- f. Pusat pembinaan nelayan/petani ikan.

Selama tahun 2006, hasil penerimaan PAD sektor perikanan yang berasal dari retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp.360.750.000,00. Dimana obyek retribusi tersebut adalah pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan lelang ikan oleh pemerintah daerah berupa tempat pelelangan ikan, baik yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 50 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, struktur dan besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di tetapkan sebesar dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu, dengan ketentuan :

- a. sebesar 2,5% dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual
- b. sebesar 2,5% dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.

5.3.3 Hasil Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

Sejak diberlakukanya Undang – Undang tentang otonomi daerah, maka setiap sektor yang berpotensi diharapkan dapat menghasilkan pendapatan sendiri yang nantinya akan memberikan kontribusi secara nyata bagi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka mengusahakan sumber pendapatannya sendiri, maka pihak Dinas Perikanan dan Kelautan

terus melakukan upaya – upaya yang diwujudkan melalui usaha dinas, yang hasilnya dapat digunakan untuk sumber pembiayaan dinas dan sumber PAD.

Upaya – upaya yang selama ini telah dilakukan sebagai usaha Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan antara lain adalah adanya kerja sama antara pihak masyarakat perikanan dengan pihak Dinas dalam sektor budidaya. Di dalam pelaksanaan kerjas sama dibidang budidaya ini, pihak dinas biasanya menyewakan sarana budidaya yang dimilikinya seperti lahan budidaya ataupun menyediakan jasa dalam hal penyediaan benih ikan yang diambil dari BBI milik dinas.

Salah satu usaha yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan adalah Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Desa Kalen Kecamatan Kedungpring, luas total BBI adalah 2 Ha dengan produksi benih : ikan Tawes 120.000 ekor, ikan Mas 325.000 ekor, ikan Nila 361.000 ekor. Selama tahun 2006 ini, hasil penerimaan PAD sektor perikanan yang berasal dari penjualan benih ikan di Balai Benih Ikan adalah sebesar Rp.5.638.500,00 sedangkan penerimaan yang diperoleh dari hasil menyewakan tambak dinas di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.4.861.500,00 penerimaan usaha dinas yang terbesar dari usaha dinas berasal dari pabrik es Tirta Maharani sebesar Rp.300.000.000,00.

5.4 Tingkat Hubungan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

5.4.1 Analisa Sektor – Sektor Penyumbang PAD

Analisa deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran ataupun menjelaskan data - data yang terkumpul agar mudah dipahami. Didalam statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan keterangan – keterangan mengenai suatu data ataupun keadaan dan fenomena yang ada.

Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi untuk menerangkan gejala atau keadaan, atau persoalan. Bentuk output analisa deskriptif yang telah dilakukan dapat dilihat pada lampiran 3. Sedangkan untuk memberi gambaran nilai kontribusi sektor – sektor penyumbang PAD baik dalam rupiah maupun dalam persentase dapat dilihat pada lampiran 2.

Pada lampiran 2 terlihat bahwa nilai kontribusi PAD pada tahun 2002 – 2006 secara berturut – turut mengalami peningkatan. Nilai PAD yang terbesar didapatkan pada tahun 2006, yaitu sebesar Rp.42.441.553.192,83,00. hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Kabupaten Lamongan mampu meningkatkan nilai kontribusi melalui program – program yang dijalankan dinas – dinas terkait sebagai alat operasional pemerintah daerah. Sedangkan PAD terkecil diperoleh pada tahun 2002, yaitu sebesar Rp.23.794.380.379,02. kecilnya PAD tersebut disebabkan karena pihak pemerintah daerah Kabupaten Lamongan masih dalam taraf penyesuaian terhadap pelaksanaan undang – undang otonomi daerah yang baru diberlakukan pada tahun 1999 serta belum maksimalnya penerimaan yang dihasilkan sektor – sektor penyumbang PAD.

Sumber – sumber PAD Kabupaten Lamongan berasal dari berbagai sektor. Sektor –sektor tersebut adalah sekretariat daerah, dispenda, kebersihan, perhubungan, perikanan, peternakan, pertanian, perhubungan, kehutanan, pekerjaan umum, perindustrian dan perdagangan, pengelolaan kekayaan daerah, keuangan, pariwisata, kesehatan, lain – lain PAD yang sah. nilai kontribusi sektor penyumbang PAD dari tahun 2002 – 2006 dapat dijelaskan sebagai berikut :

❖ Sektor Sekretariat Daerah

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa nilai kontribusi sektor sekretariat daerah mengalami penurunan pada tahun 2003, kemudian mengalami kenaikan pada 2004 – 2005 dan kemudian menurun lagi pada tahun 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.2.059.695.500,00 atau 5.14 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa sektor sekretariat daerah, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.1.000.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.677.702.510,3.

❖ Sektor Dispenda

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa nilai kontribusi sektor dispenda mengalami peningkatan pada tahun 2002 – 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.15.961.812.969,00 atau 37.61% dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa dispenda, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.8.500.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.2.122.697.276,00.

❖ Sektor Kebersihan

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa nilai kontribusi kebersihan mengalami peningkatan pada tahun 2002 – 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.115.366.900,00 atau 0,27 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa kebersihan, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.110.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.6.903.774,447,00.

❖ Sektor Perhubungan

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa nilai kontribusi perhubungan mengalami penurunan pada tahun 2003, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2004 - 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp.150.240.600,00 atau 0.63 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa perhubungan, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.140.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.6.572.155,259,00.

❖ Sektor Perikanan

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa nilai kontribusi perikanan mengalami peningkatan pada tahun 2003, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2004 kemudian meningkat lagi pada tahun 2005, kemudian menurun lagi pada tahun 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.1.339.265.300,00 atau 3.34 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa perikanan, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.720.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.354.575.992,4,00.

❖ Sektor Peternakan

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa nilai kontribusi peternakan mengalami peningkatan pada tahun 2003 - 2004, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2005 dan kembali meningkat pada tahun 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.85.400.000,00 atau 0,20 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa peternakan, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.58.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.19.019.485,00.

❖ Sektor Pertanian

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa pada tahun 2002 – 2003 tidak ada sumbangan dari sector pertanian terhadap PAD nilai kontribusi pertanian mengalami penurunan pada tahun 2005, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.20.850.000,00 atau 0,05 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa pertanian, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.10.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.9.715.425,878,00.

❖ Sektor Kehutanan

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa pada tahun 2002 – 2003 tidak ada sumbangan dari sector kehutanan terhadap PAD, nilai kontribusi kehutanan mengalami peningkatan pada tahun 2004 - 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.79.612.301,00 atau 0,19 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa kehutanan, rata – rata (nilai mean)

menyumbangkan Rp.37.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.35.779.883,00.

❖ Sektor Pariwisata

Pada lampiran 2 diketahui, nilai kontribusi pariwisata mengalami peningkatan pada tahun 2004 - 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.5.125.105.000,00 atau 12,07 % dari keseluruhan total PAD.

Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa pariwisata, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.2.600.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.2.223.652.379,00.

❖ Sektor Pekerjaan Umum

Pada lampiran 2, diketahui nilai kontribusi pekerjaan umum mengalami peningkatan pada tahun 2002 – 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.495.426.100.00 atau 1,17 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3, dapat dijelaskan bahwa pekerjaan umum, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.340.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standart deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.127.655.376 ,00

❖ Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Pada lampiran 2 diketahui, bahwa sektor Perindustrian dan perdagangan pada tahun 2002 tidak memberikan kontribusi terhadap PAD, nilai kontribusi perindustrian dan perdagangan mengalami peningkatan pada tahun 2003 – 2004, kemudian menurun pada tahun 2005 dan meningkat lagi pada tahun 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.279.706.250,00 atau 0,66 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa perindustrian dan perdagangan, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan

Rp.150.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.122.4321.200,8,00.

❖ Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pada lampiran 2 diketahui, nilai kontribusi pengelolaan kekayaan daerah mengalami peningkatan pada tahun 2003 – 2004, kemudian menurun pada tahun 2005 dan meningkat lagi pada tahun 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp.1.431.452.356,00 atau 3,98 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan daerah, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.1.200.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.253.919.596,6,00.

❖ Sektor Keuangan

Pada lampiran 2 diketahui, nilai kontribusi keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2003, kemudian menurun pada tahun 2004 - 2005 dan meningkat lagi pada tahun 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp.8.764.752.484,00 atau 27,12 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa keuangan, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.5.600.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.2.966.425.437,00.

❖ Sektor Kesehatan

Pada lampiran 2 diketahui, nilai kontribusi sektor kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2002 – 2006. Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.7.632.284.370,00 atau 17,98 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa kesehatan, rata – rata (nilai

mean) menyumbangkan Rp.4.100.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standart deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp 2.090.432.535,00.

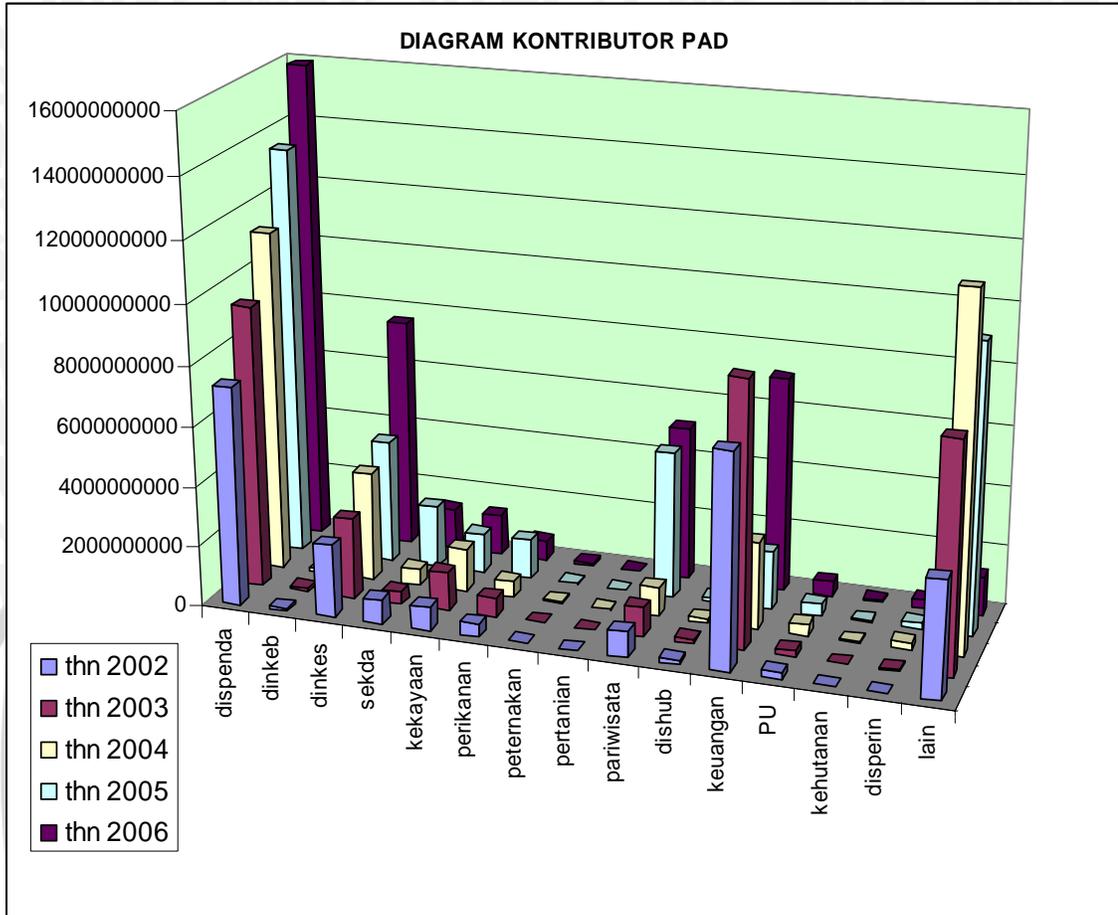
❖ Sektor Lain – lain PAD yang sah

Pada lampiran 2 diketahui, nilai kontribusi sector lain – lain PAD yang sah mengalami peningkatan pada tahun 2002 – 2003, kemudian menurun pada tahun 2004 dan meningkat lagi pada tahun 2005 dan menurun lagi pada tahun 2006.

Nilai kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.9.546.556.503.00 atau 23,83 % dari keseluruhan total PAD. Pada lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan daerah, rata – rata (nilai mean) menyumbangkan Rp.6.800.000.000,00 dalam 5 tahun dengan standar deviasi (penyimpangan dari pusat data) sebesar Rp.4.211.620.282,00.

Berdasarkan uraian diatas, sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang PAD bagi Kabupaten Lamongan, tetapi sumbangan yang diberikan masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor lain. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh sektor perikanan adalah pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.1.339.265.300,00 atau 3,34 % dari keseluruhan total PAD. Apabila dibandingkan dengan sektor – sektor penyumbang PAD yang lain, sektor perikanan menempati posisi ke 7 dari 15 sektor penyumbang PAD.

Adapun kontribusi masing – masing sektor dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Kontributor PAD Kabupaten Lamongan.

Dengan melihat kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PAD masih belum maksimal. Oleh karena itu pihak Dinas Kelautan dan Perikanan bersama pihak yang terkait lainnya sedapat mungkin memaksimalkan pemanfaatan potensi perikanan di Kabupaten Lamongan yang cukup besar. Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD dan menjadikan sektor perikanan sebagai sektor andalan tumpuan perekonomian daerah.

5.4.2 Analisa korelasi Antara PAD dengan Sektor – Sektor penyumbang PAD

Analisa korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan liner antara variabel x dan y. Variabel x yang digunakan di dalam analisa korelasi ini adalah sektor – sektor penyumbang PAD. Sektor – sektor tersebut meliputi sektor sekretariat daerah, sektor Dispenda, sektor kesehatan, sektor kebersihan, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor keuangan, sektor pengelolaan kekayaan daerah, lain – lain PAD yang sah.

Menurut Singgih (2002), analisa korelasi akan menganalisa apakah sebuah variabel mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya. Dan jika ada hubungan, bagaimana hubungan tersebut, serta seberapa jauh variabel tersebut mempengaruhi variabel lainnya. Pada prinsipnya, prosedur korelasi bertujuan untuk mengetahui dua hal pada hubungan antar dua variabel :

1. apakah kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan.
2. jika terbukti hubungan adalah signifikan, bagaimana arah hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut.

Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil. Tanda negatif pada output menunjukkan arah yang berlawanan artinya kenaikan satu variabel akan menyebabkan penurunan variabel yang lain. Tanda positif menunjukkan arah yang sama atau searah dimana kenaikan suatu variabel akan menyebabkan kenaikan variabel yang lain dan sebaliknya penurunan variabel akan menyebabkan penurunan variabel yang lain.

Pada praktek, angka korelasi sebagian terbesar terletak diantara 0 – 1, dan mengacu pada kebiasaan yang ada bukan pada dasar teori tertentu dapat dibuat pedoman sebagai berikut :

Tabel 26. Pedoman Penentuan Keeratan Hubungan Korelasi

Nilai (r)	Kriteria hubungan
0	Tidak ada korelasi
0 – 0,5	Korelasi sangat lemah
0,5 – 0,8	Korelasi lemah
0,8 – 1	Korelasi kuat
1	Korelasi sempurna

Metode korelasi akan membahas keeratan hubungan, dalam hal ini keeratan hubungan antara PAD dengan sektor – sektor penyumbang PAD. Analisa korelasi antara PAD dengan sektor – sektor penyumbang PAD disajikan pada lampiran 4. Berdasarkan output analisa korelasi dapat terlihat bahwa secara umum sektor penyumbang PAD yang signifikan atau berpengaruh nyata terhadap PAD adalah sektor dispenda, sektor kebersihan, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor kehutanan untuk lebih jelasnya analisa korelasi antara PAD dengan sektor - sektor penyumbang lainya dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Sektor Dispenda

Nilai r untuk sektor Dispenda adalah sebesar 0,971. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Dispenda memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Dispenda berada pada selang 0,8 - 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Dispenda berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,06 < 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor Dispenda signifikan atau berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Kesehatan

Nilai r untuk sektor Kesehatan adalah sebesar 0,807. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Kesehatan memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Kesehatan berada pada selang 0,8 - 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Kesehatan berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,99 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor kesehatan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Kebersihan

Nilai r untuk sektor Kebersihan adalah sebesar 0,960. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Kebersihan memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Kebersihan berada pada selang 0,8 - 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Kebersihan berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,99 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor kebersihan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Sekretariat Daerah

Nilai r untuk sektor Sekretariat Daerah adalah sebesar 0,629. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Sekretariat Daerah memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Sekretariat Daerah berada pada selang 0,5 – 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Sekretariat Daerah berkorelasi lemah dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,256 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor sekretariat daerah tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah

Nilai r untuk sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah sebesar 0,796. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Pengelolaan Kekayaan Daerah berada pada selang 0,5 – 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah berkorelasi lemah dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,284 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor pengelolaan kekayaan daerah tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Perikanan

Nilai r untuk sektor Perikanan adalah sebesar 0,601. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Perikanan memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Perikanan berada pada selang 0,5 – 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Perikanan berkorelasi lemah dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,284 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor perikanan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Peternakan

Nilai r untuk sektor Peternakan adalah sebesar 0,672. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Peternakan memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Peternakan berada pada selang 0,5 – 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Peternakan berkorelasi lemah dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,215 > 0,1$ (taraf kepercayaan

90%), sehingga dapat disimpulkan sektor peternakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Pertanian

Nilai r untuk sektor Pertanian adalah sebesar 0,853. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Pertanian memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Pertanian berada pada selang 0,8 – 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,066 < 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor pertanian signifikan atau berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Pariwisata

Nilai r untuk sektor Pariwisata adalah sebesar 0,856. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Pariwisata memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Pariwisata 0,8 - 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Pariwisata berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,064 < 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor pariwisata signifikan atau berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Perhubungan

Nilai r untuk sektor Kesehatan adalah sebesar -0,803. Nilai r tersebut bertanda negatif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Kesehatan memiliki suatu hubungan negatif dengan PAD. Selain itu nilai koefisien korelasi (r) Perhubungan berada pada selang 0,8 - 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Kesehatan berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,102 > 0,1$ (taraf

kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor perhubungan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Keuangan

Nilai r untuk sektor Keuangan adalah sebesar $-0,339$. Nilai r tersebut bertanda negatif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Keuangan memiliki suatu hubungan negatif dengan PAD. Selain itu nilai koefisien korelasi (r) Keuangan lebih besar dari $0,5$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Keuangan berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,577 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor keuangan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Pekerjaan Umum

Nilai r untuk sektor Pekerjaan Umum adalah sebesar $0,878$. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Pekerjaan Umum memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Pekerjaan Umum berada pada selang $0,8 - 1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Pekerjaan Umum berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,05 < 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor pekerjaan umum signifikan atau berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Nilai r untuk sektor Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar $0,878$. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Perindustrian dan Perdagangan memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Perindustrian dan Perdagangan berada pada selang $0,8 - 1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Perindustrian dan Perdagangan berkorelasi kuat dengan

PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,05 < 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor perindustrian dan perdagangan signifikan atau berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Kehutanan

Nilai r untuk sektor Kehutanan adalah sebesar 0,878. Nilai r tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Kehutanan memiliki suatu hubungan positif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Kehutanan berada pada selang 0,8 - 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Kehutanan berkorelasi kuat dengan PAD.

Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,05 < 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor kehutanan signifikan atau berpengaruh nyata terhadap PAD.

➤ Sektor Lain – Lain PAD yang Sah

Nilai r untuk sektor Lain – Lain PAD yang Sah adalah sebesar -0,008. Nilai r tersebut bertanda negatif sehingga dapat dikatakan bahwa sektor Lain – Lain yang Sah memiliki suatu hubungan negatif dengan PAD. Nilai koefisien korelasi (r) Lain – Lain yang Sah berada pada selang 0,8 - 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor Lain – Lain yang Sah berkorelasi kuat dengan PAD. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya $0,99 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan sektor lain – lain pad yang sah tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang PAD di Kabupaten Lamongan. Nilai koefisien korelasi (r) 0,601 berada pada selang 0,5 – 0,8 sehingga dapat dikatakan bahwa sektor perikanan berkorelasi kuat dengan PAD dan probabilitas sektor perikanan adalah sebesar $0,284 > 0,1$ (taraf kepercayaan 90%) dapat disimpulkan

bahwa sektor perikanan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap PAD. Adapun tingkat signifikansi Korelasi sektor – sektor penyumbang PAD dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 27. Tingkat Signifikansi Korelasi Sektor – Sektor Penyumbang PAD Kabupaten Lamongan.

No	Sektor	Koefisien Korelasi	nilai signifikansi	Keterangan
1	Dinas Pendapatan Daerah	0,971	0,008	signifikan
2	Dinas Kebersihan	0,96	0,009	signifikan
3	Dinas Kesehatan	0,807	0,99	tidak signifikan
4	Sekretariat Daerah	0,629	0,258	tidak signifikan
5	Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,796	0,107	tidak signifikan
6	Perikanan	0,601	0,284	tidak signifikan
7	Peternakan	0,672	0,215	tidak signifikan
8	Pertanian	0,853	0,066	signifikan
9	Pariwisata	0,856	0,064	signifikan
10	Dinas Perhubungan	-0,803	0,102	tidak signifikan
11	Keuangan	-0,339	0,577	tidak signifikan
12	Dinas Pekerjaan Umum	0,878	0,05	signifikan
13	Dinas Kehutanan	0,878	0,05	signifikan
14	Dinas Perindustrian	0,878	0,05	signifikan
15	Lain – Lain	-0,008	0,99	tidak signifikan

5.4.3 Analisa Regresi

Analisa regresi digunakan untuk menguji hubungan sekaligus pengaruh dari variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). Dalam Sedangkan analisa regresi ini digunakan satu peubah bebas yaitu x (nilai kontribusi sektor perikanan) dan satu peubah terikat yaitu y (nilai PAD Kabupaten Lamongan).

Dari analisa regresi ini dapat diketahui pula persamaan regresi yang terjadi antara nilai kontribusi sektor perikanan dengan nilai PAD. Persamaan itu adalah :

$$Y = 26.000.000.000 + 12,385 X$$

Konstanta sebesar 26.000.000.000 menyatakan bahwa jika tidak ada kontribusi dari sektor perikanan maka nilai PAD adalah Rp.26.000.000.000. koefisien regresi sebesar 12,385 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 rupiah dari sektor perikanan maka akan dapat meningkatkan nilai PAD sebesar Rp.12,385.

Untuk mengetahui hubungan/pengaruh nilai kontribusi terhadap PAD maka dilakukan uji regresi sederhana yang meliputi uji R^2 , uji F dan uji t disajikan dalam output analisa regresi sederhana pada lampiran 5.

❖ Uji koefisien determinasi majemuk (R^2)

Tingkat hubungan variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2). Koefisien ini menunjukkan besarnya sumbangan variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat.

Kegunaan dari koefisien ini adalah :

- untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang diterapkan suatu kelompok data observasi. Apabila R^2 makin besar maka akan semakin tepat suatu garis regresi. Sebaliknya semakin kecil nilai R^2 menunjukkan semakin tidak tepatnya garis regresi tersebut untuk mewakili garis observasi. Koefisien determinasi mempunyai nilai antara 0 – 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).
- Untuk mengukur besarnya presentase dari jumlah jumlah variasi dari variabel dependent dapat dikatakan seberapa jauh variabel independent mampu menerangkan variabel dependent.

Nilai koefisien determinasi majemuk ini dalam perhitungan tidak akan dapat mencapai 1 atau 100 % karena tidak semua variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, hal ini disebabkan oleh faktor diluar model yang tidak masuk kedalam model dan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.

Berdasarkan output regresi tabel Model Summary kolom Adjusted R square diperoleh sebesar 0,148. nilai tersebut menunjukkan bahwa 14,8 % nilai PAD dipengaruhi oleh nilai kontribusi sektor perikanan sedangkan sisanya atau 80,2 % nilai PAD dipengaruhi oleh sektor lain yang tidak termasuk dalam model.

❖ Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peranan variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat atau untuk menilai kebaikan suatu model.

Adapun hipotesa yang digunakan dalam uji F adalah:

H₀ : sektor perikanan tidak berpengaruh nyata terhadap PAD

H₁ : sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap PAD

Dari uji Anova (F test) pada output analisa regresi, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 1,695 dan F tabel adalah 10.13 dengan tingkat signifikansi 0,284. berdasarkan nilai F tersebut diketahui bahwa nilai F hitung < F tabel dan probabilitas $0,284 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa Ho diterima, berarti nilai kontribusi sektor perikanan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai PAD.

❖ Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hubungan regresi secara parsial yaitu untuk melihat keberartian dari masing – masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

Dengan hipotesa yang digunakan yaitu :

H0 : sektor perikanan tidak berpengaruh nyata terhadap PAD

H1 : sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap PAD

Dari hasil output analisa regresi diketahui bahwa nilai t hitung adalah 1,302 dan nilai t tabel adalah 2.35. berdasarkan nilai t tersebut diketahui bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dengan demikian data disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak terdapat hubungan antara nilai kontribusi sektor perikanan terhadap nilai PAD.

5.5 Basis Sektor Perikanan

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat potensi daerah adalah *Location Quotien* (LQ). Konsep *Location Quotien* digunakan untuk mengetahui basis suatu sektor pada wilayah tertentu. Analisa ini digunakan untuk mengetahui apakah sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan sektor basis dalam kegiatan ekonomi perikanan di Jawa Timur.

Untuk mengetahui adanya *Overspecialization* atau *Underspecialization* dari sektor perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan diambil variabel PAD sektor perikanan seluruh Propinsi Jawa Timur. Adapun perhitungan nilai LQ terhadap PAD perikanan di Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{vp1/vs1}{Vp2/Vs2}$$

Keterangan :

- LQ = *Location Quotient*
- vp1 = PAD sektor perikanan di Kabupaten Lamongan
- vs 1 = PAD seluruh sektor di Kabupaten Lamongan

- Vp 2 = PAD sektor perikanan se-Jawa Timur
- Vs 2 = PAD seluruh sektor se-Jawa Timur

$$LQ = \frac{Rp.1.339.265.300 / Rp.40.067.207.856,37}{Rp.3.439.390.000 / Rp.2.860.561.590.000}$$

$$= \frac{0,033425471}{0,001202348}$$

$$= 27,8$$

Nilai perhitungan LQ yang telah diperoleh didapat beberapa kriteria penilaian sebagai berikut :

- Jika $LQ > 1$, maka sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan basis ekonomi khususnya dibidang perikanan di Propinsi Jawa Timur.
- Jika $LQ < 1$, maka sektor perikanan di Kabupaten Lamongan bukan merupakan basis ekonomi khususnya dibidang perikanan di Propinsi Jawa Timur.

Dari Analisis *Location Quotient* (LQ) diperoleh nilai 27,8 maka dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan sektor basis kegiatan ekonomi khususnya dibidang perikanan di Propinsi Jawa Timur.

Hal ini didukung dengan adanya sumberdaya perikanan yang terkandung di perairan Kabupaten Lamongan. Selain itu sektor perikanan merupakan sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan.

5.5.1 Analisa Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PAD

Diberlakukanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah khususnya Daerah Tingkat II. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah didalam otonomi harus disertai dengan adanya pelimpahan keuangan, dimana tanpa adanya pelimpahan ini otonomi daerah tidak akan memberikan makna. Salah satu faktor penting didalam pelimpahan kewenangan keuangan adalah kebebasan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Lamongan mempunyai PAD yang relatif besar, pada tahun 2006 tingkat pencapaian realisasinya sebesar 108,01 %. Dengan demikian ada peluang untuk meningkatkan perolehan PAD pada tahun – tahun yang akan datang. Hubungan PAD dengan penyelenggaraan pembangunan tidak dapat dipisahkan, apabila dukungan dananya kurang, maka penyelenggaraan pembangunan akan berjalan tidak lancar. Sumber dari penerimaan PAD berasal dari berbagai sektor yang telah dijelaskan didalam penjelasan sebelumnya. Salah satu sumber penerimaan PAD di Kabupaten Lamongan berasal dari sektor perikanan. berdasarkan analisa deskriptif, analisa korelasi serta analisa regresi, maka dapat diketahui bahwa nilai kontribusi sektor perikanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai PAD Kabupaten Lamongan. Tetapi menurut analisa *Location Quotient* (LQ) sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan sektor basis dan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dibidang perikanan di Wilayah Propinsi Jawa Timur.

Apabila ditinjau dari potensi sektor perikanan dan kelautan yang cukup besar di Kabupaten Lamongan, seharusnya sektor perikanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai PAD dan dapat dijadikan salah satu sektor utama penyokong perekonomian daerah. Tetapi analisa data membuktikan bahwa sektor perikanan kontribusinya terhadap PAD relatif masih kecil jika dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini menandakan bahwa sektor perikanan belum dikelola secara optimal, pengelolaan sektor perikanan secara optimal diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Lamongan. Disamping itu pengoptimalan sektor perikanan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat, yang berakibat pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi.

Adanya potensi yang besar dari sektor perikanan juga dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto. Penggunaannya sering dipakai sebagai alat ukur untuk mengevaluasi perkembangan atau stabilitas ekonomi secara makro pada periode waktu tertentu. Dikatakan oleh Suparmoko (1996), bahwa PDRB merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dengan harga pasar. PDRB mencerminkan gambaran *Produktion Oriented* di suatu daerah tertentu. Apabila PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat. Untuk mengetahui nilai PDRB Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 28. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan, 2003 – 2005.

No	Lapangan Usaha	2003		2004		2005	
		PDRDB	%	PDRDB	%	PDRDB	%
1	Tanaman bhn makan	1.302.976,39	36,8	1.326.203,92	35,88	1.349.600,89	34,75
2	Tanaman Perkebunan	35.310,58	1	36.064,86	0,98	37.555,25	0,97
3	Peternakan	75.506,86	2,1	79.283,16	2,15	81.274,2	2,09
4	Kehutanan	4.532,09	0,1	4.239,36	0,11	4.315,23	0,11
5	Perikanan	257.449,24	7,2	259.650,46	7,03	261.942,99	6,74
6	Pertambangan	6.829,57	0,1	7.098,26	0,19	7.759,12	0,2
7	Industri	183.288,13	5,1	196.621,2	5,32	209.626,03	5,39
8	Listrik	51.440,89	1,4	47.371,74	1,28	48.225,67	1,24
9	Bangunan	110.208,38	3,1	120.845,82	3,27	130.557,85	3,36
10	Perdagangan	918.389,72	25,9	1.003.532,26	27,15	1.094.083,22	28,17
11	Pengangkutan	57.126,07	1,6	60.572,36	1,65	63.567,28	1,65
12	Keuangan	113.581,96	3,2	126.407,32	3,41	141.942,93	3,64
13	Jasa Pemerintahan	195.298,02	5,5	198.097,29	5,36	203.275,89	5,25
14	Jasa Swasta	225.784,75	6,3	229.805,73	6,22	249.975,24	6,44
	Jumlah	3.537.722,65	100	3.695.793,74	100	3.883.701,78	100

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2007.

Berdasarkan Tabel 27 terlihat bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor perikanan cukup tinggi bila dibandingkan sektor – sektor yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor perikanan lebih tinggi dari sektor yang lain. Untuk mengetahui nilai PAD yang diperoleh sudah maksimal atau belum, maka dibandingkan antara nilai PAD dengan nilai PDRDB. Adapun perbandingan antara PAD terhadap PDRDB dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 29. Nilai PDRB dan PAD dari Sektor Perikanan Tahun 2002 – 2005.

No	Keterangan	Nilai (Rp. 1.000.000)			
		2002	2003	2003	2005
1	PDRB	257.924,25	257.449,24	259.650,46	261.942,99
2	PAD	440,69	638,34	543,19	1.339,26
3	% PAD terhadap PDRB	0,51	0,21	0,25	0,17

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2006

Berdasarkan tabel 29 diatas dapat dilihat bahwa nilai PAD sektor perikanan bila dibandingkan dengan nilai PDRB maka hasilnya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PAD yang diperoleh dari sektor perikanan belum maksimal.

Menurut Ambardi dan Prihawantoro (2002), dikatakan bahwa upaya pengoptimalan penerimaan PAD dapat juga berarti mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari semua sektor PAD agar penerimaannya melampaui atau mendekati target yang telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya. Usaha – usaha peningkatan PAD lainnya yang dapat diterapkan antara lain :

- Mengadakan kerjasama perusahaan daerah dengan pihak ketiga dalam upaya memanfaatkan aset perusahaan daerah agar lebih bermanfaat.
- Meningkatkan kemampuan permodalan melalui bantuan pinjaman dalam dan luar negeri, serta melepas aset – aset yang benar – benar tidak efisien dan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi.
- Kemampuan aparat pemungut pajak didaerah harus lebih ditingkatkan melalui pendidikan khusus, misalnya studi banding.
- Tertib organisasi dan administrasi dilakukan dengan meningkatkan kinerja dinas pendapatan daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.

- Tertib peraturan perundangan dengan melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, artinya pungutan yang dilakukan merupakan kewenangan daerah yang bersangkutan dan pelaksanaannya telah dituangkan dalam peraturan perundangan yang berlaku (peraturan daerah) yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- Penegakan hukum dan sanksi.
- Penyuluhan perlu dilakukan kepada para wajib retribusi untuk menumbuhkan kesadaran akan kewajibannya dalam membayar retribusi atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
- Penyempurnaan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi.
- Rasionalisasi bidang retribusi daerah, dengan menyederhanakan prosedur perijinan serta menginventarisasi semua kepentingan daerah.

Selain usaha diatas, peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan cara menjangring wajib pajak/retribusi yang baru dengan mengenakan jenis pajak daerah atau retribusi daerah dimana pajak daerah yang dikenakan harus memiliki daya guna ekonomi dan penggunaan sumberdaya. Usaha ekstensifikasi yang dilakukan sebagai usaha peningkatan nilai kontribusi sektor perikanan terhadap PAD meliputi :

- Mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan laut, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengundang investor untuk mengembangkan usaha dibidang perikanan.

- Mengembangkan Kawasan Pengembangan Utama Komoditi (KAPUK) dan sentra pengembangan perikanan. Mengingat peluang pasar untuk ikan laut dan tawar sangat besar.

Masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Lamongan disebabkan oleh antara lain:

1. Masyarakat masih beranggapan, fasilitas, sarana dan prasarana, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang sehingga mereka enggan membayar retribusi. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya retribusi juga menjadi kendala dalam penarikan retribusi.
2. Tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar retribusi.
3. Baru berlakunya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penarikan retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sehingga sosialisasinya kurang.
4. Menurunnya produksi penangkapan sehingga mempengaruhi pendapatan sektor perikanan.
5. Potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan diatas usaha – usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

1. Meningkatkan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat didalam membayar pajak dan retribusi daerah, serta memberi pengertian akan pentingnya retribusi daerah.

2. Melakukan usaha perikanan baik yang dilakukan langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan maupun dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga (misalnya : adanya kegiatan budidaya ikan, pembenihan dan pengolahan hasil perikanan).
3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan pajak atau menyederhanakan proses pembayarannya.
5. Menambah fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu produksi hasil tangkapan.
6. Mengadakan operasi penertiban perijinan kelautan dan perikanan.

Dengan melaksanakan usaha – usaha diatas diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor perikanan, yang nantinya dipergunakan bagi pembangunan khususnya disektor perikanan di Kabupaten Lamongan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Potensi usaha perikanan di Kabupaten Lamongan adalah potens usaha perikanan tangkap, potensi usaha penangkapan di perairan umum, potensi usaha budidaya (tambak, kolam, sawah tambak), potensi pemasaran, potensi pengolahan. Produksi usaha perikanan di Kabupaten Lamongan dari tahun ketahun (2000 – 2004) terus mengalami peningkatan.
2. Pembangunan sektor perikanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan diantaranya pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan usaha perikanan, pemberdayaan nelayan dan petani ikan, dan konservasi lingkungan.
3. Kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir (2002 – 2006) relatif kecil dibanding sektor lain (rata – rata kontribusi PAD seluruh sektor 5,5 %). Kontribusi terbesar diberikan pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.1.339.265.300,00 atau 3,5 % dari total PAD.
4. Tingkat hubungan antara kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah lemah dan tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari hasil uji korelasi dan uji regresi, baik uji R^2 , F, dan t yang kesemuanya menunjukkan sektor perikanan tidak berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan sektor basis perikanan di Propinsi Jawa Timur hal itu dapat dilihat dari analisa *Location Quotient* diperoleh nilai LQ untuk sektor perikanan di Kabupaten Lamongan adalah 27,8.

4.2 Saran

1. Upaya peningkatan nilai PAD dari sektor perikanan dengan cara meningkatkan produksi harus diimbangi dengan konservasi sumberdaya, agar pemanfaatan sumberdaya perikanan bisa dilakukan secara berkelanjutan.
2. Penegakan hukum dan sanksi.
3. Lebih meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Pengoptimalan potensi perikanan baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan.
5. Meningkatkan investasi di bidang perikanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi dan Prihawantoro, (2002). **Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah.** Dalam Melathi (2006). **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.** Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. (tidak diterbitkan)
- Ananta, A, 1987. **Landasan Ekonometrika.** PT Gramedia. Jakarta.
- Anonymous, 2000. **Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Lamongan.** Dinas Perikanan dan Kelautan. Lamongan.
- , 2001. **Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Lamongan.** Dinas Perikanan dan Kelautan. Lamongan.
- , 2002. **Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Lamongan.** Dinas Perikanan dan Kelautan. Lamongan.
- , 2003. **Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Lamongan.** Dinas Perikanan dan Kelautan. Lamongan.
- , 2004. **Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Lamongan.** Dinas Perikanan dan Kelautan. Lamongan.
- Assauri, S, 1984. **Teknik dan Metode Peramalan.** Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bakar, MA, 2002. **Peran Organisasi Masyarakat Perikanan Dalam Pembangunan Perikanan Nasional.** ISPIKANI.
- Banoewidjojo, M, 1987. **Pembangunan Pertanian.** Dalam Inventarisasi Potensi Perikanan dan Kontribusinya Terhadap PDRB Kabupaten Malang. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. (tidak diterbitkan)
- Cholik, F, 2002. **Menggapai Cita – Cita Luhur Perikanan Sebagai Sektor Andalan Nasional.** ISPIKANI.
- Daniel, M, 2002. **Metode Penelitian Sosial Ekonomi.** Bumi Aksara. Jakarta.
- Dahuri, R, 2002. **Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan.** ISPIKANI.

- Fauzi, A, 2004. **Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Glasson, (1978). Dalam melathi (2006). **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi**. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. (tidak diterbitkan)
- Heruwati, E.S, 2002. **Pengembangan Produk Pasca Panen Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Akselerasi Pembangunan Perikanan**. ISPIKANI.
- Katili, J.A,1983. **Sumberdaya Alam Untuk Pembangunan Nasional**. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Koentjoronigrat, 1991. **Metode Penelitian Masyarakat**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Marzuki, 1986. **Metodologi Riset**. Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Nurhakim, S, 2002. **Peran Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pembangunan Perikanan**. ISPIKANI.
- Nurcholis, H, 2005. **Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. PT Grasindo. Jakarta.
- Primyastanto, M, 2006. **Paket Panduan Praktikum Ekonometrika Perikanan**. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Reksohadiprojo, 1985. **Pengantar Ekonomi Sumberdaya Alam**. BPFE. Yogyakarta.
- Singarimbun, M. dan Efendi, S, 1982. **Metode Penelitian Survei LP3S**. PT Matahari Bhakti. Jakarta.
- Soekartawi, 1994. **Teori Ekonomi Produksi**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudjana, 2005. **Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah**. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Tamsil, A, 2001. **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang Produktif Efisien dan Berkelanjutan Menuju Pemulihan Ekonomi Sosial**. Seminar Nasional Himapikani. UMI Makasar.
- Tribawono, MSi, 2002. **Hukum Perikanan Indonesia**. Penerbit Citra Aditya Bukti. Bandung.

Victor, N, 2002. **Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.

Widodo, J, 2002. **Evaluasi Metode Pengkajian Stok Ikan Laut Indonesia**. ISPIKANI.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

